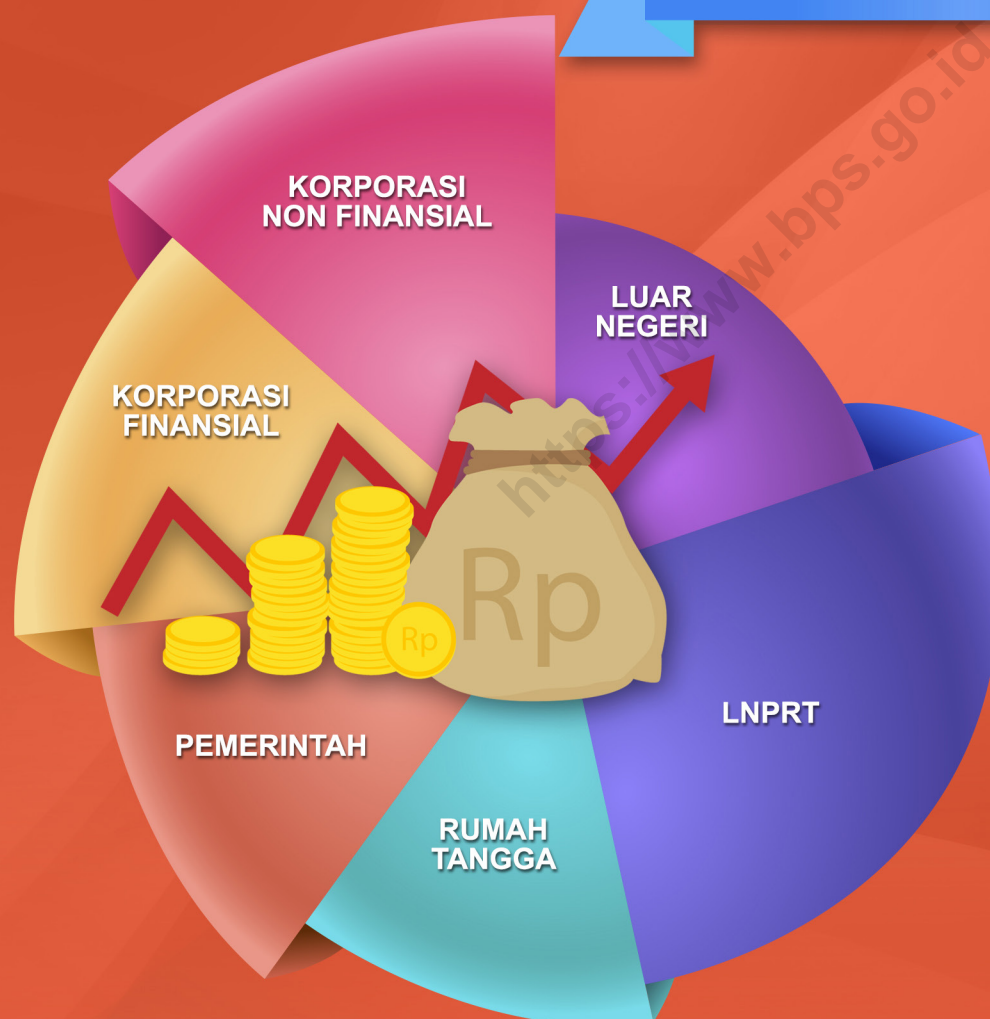




Katalog: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

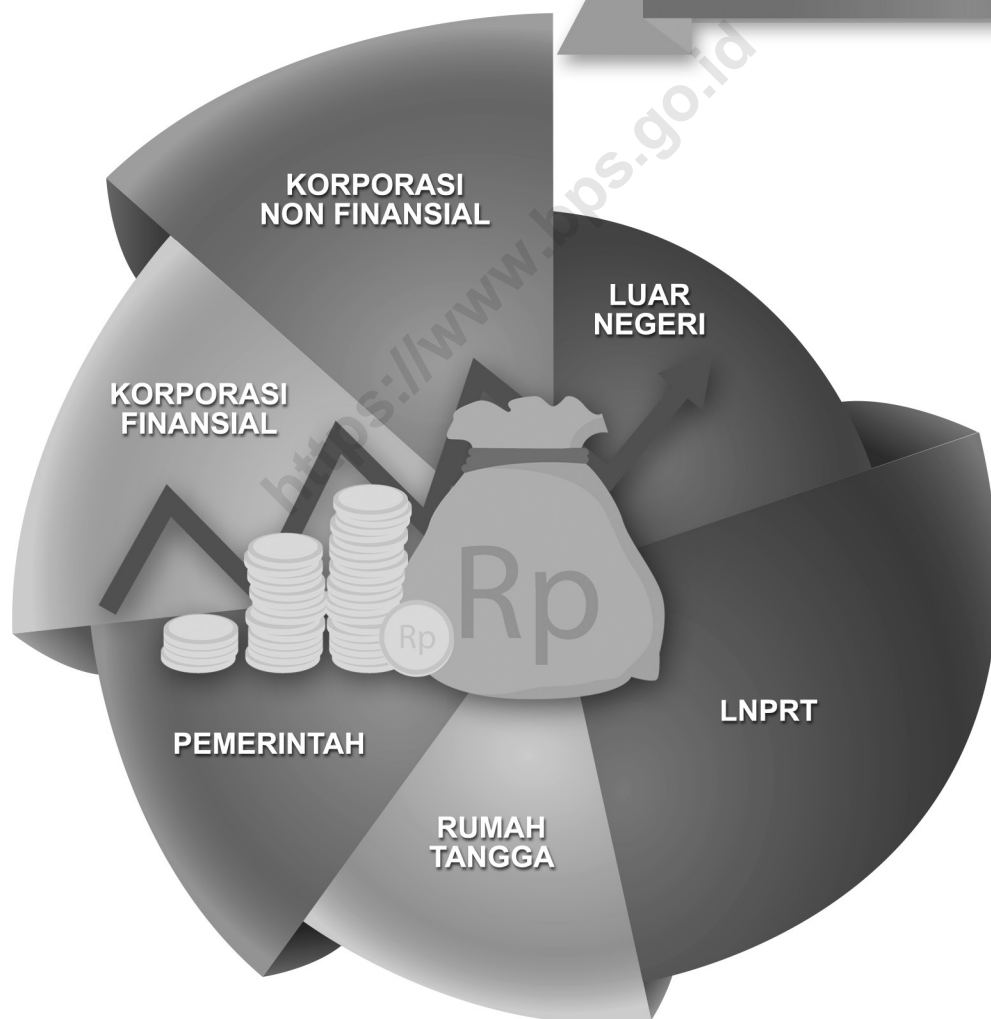
2013-2017



BADAN PUSAT STATISTIK

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2013-2017



NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN 2013-2017

ISSN: 0854-6967

Nomor Publikasi: 07230.1801

Katalog: 9502002

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+JJ Halaman

Naskah:

Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia Tahunan 2013-2017 adalah publikasi yang menyajikan gambaran serta informasi mengenai data investasi di Indonesia. Data yang disajikan mencakup informasi mengenai perkembangan investasi, baik investasi finansial maupun nonfinansial, tahunan dalam berbagai kategori transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (sektor). Sektor dalam publikasi ini terdiri dari: Korporasi NonFinansial, Korporasi Finansial, Pemerintahan Umum, Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT), dan Luar Negeri.

Publikasi Neraca Arus Dana Tahunan ini merupakan seri ketiga yang penyusunan datanya mengacu pada *System of National Accounts* (SNA) 2008. Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan, beberapa data dalam publikasi ini masih bersifat sementara dan akan direvisi pada penerbitan berikutnya apabila ada data terkini dan/atau penyempurnaan metodologi.

Kami mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca dan pengguna data demi perbaikan publikasi ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, September 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



Dr. SUHARIYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
Ringkasan Eksekutif.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II. KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum.....	5
2.2 Kerangka Teori NAD.....	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional.....	6
2.4 Kegunaan Neraca Arus Dana	8
BAB III. KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	11
3.1 Kerangka NAD Indonesia	11
3.2 Sumber Data dan Metode Penyusunan	23
BAB IV. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA.....	33
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia tahun 2017	33
4.2 Perkembangan Tabungan Bruto.....	36
4.3 Perkembangan Investasi.....	38
4.4 Perkembangan Celah Tabungan dan Investasi (<i>S-I Gap</i>) Tahun 2013-2017	43
4.5 Percepatan Uang Beredar (<i>Velocity of Money</i>) dan Pendalaman Sektor Keuangan (<i>Financial Deepening</i>)	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)	36
Tabel 4.2	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2013-2017 (Persen)	36
Tabel 4.3	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB tahun 2013-2017 (Persen)	37
Tabel 4.4	Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah) ...	39
Tabel 4.5	Struktur Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Tahun 2013-2017 (Persen).	40
Tabel 4.6	Struktur Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2013-2017 (Persen)	41
Tabel 4.7	Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2017 (Triliun rupiah)	42
Tabel 4.8	Komposisi Perubahan Kepemilikan Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif Menurut Sektor tahun 2017 (Triliun Rupiah)	42
Tabel 4.9	Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi Tahun 2017 (Triliun Rupiah)	43
Tabel 4.10	<i>S-I Gap</i> Menurut Sektor Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)	44
Tabel 4.11	Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Tahun 2013-2017	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Proporsi Investasi Indonesia Tahun 2016 dan 2017 (Persen)	38
Grafik 4.2	Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)	39
Grafik 4.3	Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB Tahun 2013-2017 (Persen)	47
Grafik 4.4	<i>Velocity of Money</i> Tahun 2013-2017	48

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L1-1 - L1-10
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L2-1 - L2-8
Lampiran 3. Matrik NAD Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	L3-1 - L3-10
Lampiran 4. Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor	L4-1 - L4-12

<https://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang lengkap menggambarkan penggunaan tabungan dan sumber dana lainnya untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh sektor-sektor institusi pada periode waktu tertentu. Neraca Arus Dana (NAD) juga menampilkan kegiatan transaksi finansial antar berbagai sektor menggunakan berbagai jenis surat hutang (instrumen finansial) pada periode waktu tertentu.

Tabungan dalam istilah NAD merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran dari kegiatan ekonomi. Penerimaan meliputi, surplus usaha dari kegiatan memproduksi barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi yang dimiliki (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). Pengeluaran mencakup pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll), dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Tabungan dalam konteks ini adalah tabungan bruto, yaitu tabungan (sesuai penjelasan diatas) ditambah dengan penyusutan barang modal.

Tabungan merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk investasi. Sumber lainnya untuk berinvestasi adalah penerimaan yang berasal dari transaksi keuangan seperti, penerimaan dari hasil penerbitan saham/obligasi, penerimaan pinjaman, dan sebagainya. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh berbagai sektor institusi mencakup investasi finansial dan investasi nonfinansial (investasi riil). Investasi finansial adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor institusi dengan menggunakan berbagai instrumen finansial seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), pinjaman, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), surat berharga jangka pendek, dan sebagainya. Investasi nonfinansial (investasi riil) mencakup penambahan serta pengurangan barang-barang modal dan inventori (stok) yang dilakukan oleh suatu sektor institusi. Sektor-sektor institusi dalam Neraca Arus Dana tahunan dibagi menjadi Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, Rumah Tangga, Lembaga Non Profit (LNPR), dan Luar Negeri.

NAD disajikan dalam bentuk matrik, yaitu suatu sajian dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Baris pada matrik NAD menunjukkan kategori transaksi, yaitu jenis-jenis transaksi baik transaksi finansial maupun nonfinansial, seperti pembentukan modal tetap bruto, pinjaman, saham, surat berharga jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan kolom pada matriks NAD menunjukkan pembagian sektor-

sektor institusi. Setiap sektor institusi mempunyai dua kolom yaitu kolom perubahan aset dan kolom perubahan kewajiban. Kolom perubahan aset digunakan untuk mencatat semua perubahan (arus) aset (harta) baik aset finansial maupun aset nonfinansial, sedangkan kolom perubahan kewajiban digunakan untuk mencatat perubahan (arus) kewajiban finansial dan ekuitas.

NAD dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dapat dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). NAD merupakan sistem data tertutup yang di dalamnya melibatkan sektor Luar Negeri. Sebagai suatu sistem data tertutup berlaku bahwa setiap perubahan aset di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah arus penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah arus sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Pada masing-masing sektor berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan aset dikurangi dengan perubahan kewajiban akan sama net lending/borrowing.

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2017

Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya pasar keuangan dapat dilihat melalui matrik NAD 2013-2017. Matrix tersebut menggambarkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dengan menggunakan berbagai instrumen keuangan yang terjadi selama periode tersebut. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro Indonesia adalah tabungan bruto, investasi nonfinansial, Saving Investment Gap (S-I gap), dan investasi finansial.

Perekonomian global pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 3,7 persen lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 3,2 persen. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07 persen, menguat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Kondisi tersebut didorong oleh kuatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi fisik serta kinerja ekspor yang membaik. Pertumbuhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,16 persen dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,47 persen. Namun, pengeluaran konsumsi rumah tangga sedikit melambat di tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar

5,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan informasi dan komunikasi (9,81 persen), jasa lainnya (8,66 persen) serta transportasi dan pergudangan (8,49 persen). Namun, karena tekanan keuangan global, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika secara rata-rata melemah dari Rp13.305 per dollar pada tahun 2016 menjadi Rp13.384 di tahun 2017.

Perkembangan suku bunga (sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi pasar uang) selama tahun 2017 menunjukkan kondisi yang menurun dibanding tahun 2016. Suku bunga deposito pada tahun 2017 turun 65 bps dibandingkan akhir tahun 2016 sebesar 7,17 persen. Penurunan suku bunga deposito juga diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan. Sepanjang tahun 2017 suku bunga modal kerja, investasi dan konsumsi mengalami penurunan berkisar 0,45-0,80 persen dibandingkan tahun 2016.

Kinerja industri perbankan mengalami perlambatan selama tahun 2017. Pertumbuhan kredit perbankan tahun 2017 sebesar 9,24 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 10,38 persen. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami penurunan sebesar 9,67 persen pada akhir tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 9,98 persen. Sementara itu, rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) kinerja perbankan terjaga baik. Hal tersebut tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2017 sebesar 23,18 persen jauh di atas cadangan minimum 8 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 2,5 persen turun dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,9 persen. NPL ini masih cukup aman karena di bawah 5 persen sebagai tolok ukur penilaian kredit bermasalah (NPL).

Kondisi pasar saham domestik relatif mengalami peningkatan selama tahun 2017 yang didorong oleh sentimen positif baik yang berasal dari global maupun domestik. Pada akhir tahun 2017 IHSG tercatat pada level 6.355,7 meningkat 19,99 persen dari IHSG pada akhir tahun 2016 yang tercatat pada level 5.296,7. Sejalan dengan pasar saham, kinerja pasar obligasi selama tahun 2017 tercatat membaik. Kondisi pasar keuangan global yang lebih stabil dan membaiknya prospek perekonomian global turut mempengaruhi kondisi pasar saham di Indonesia.

Perkembangan Tabungan Bruto

Selama kurun waktu 2013-2017, tabungan bruto menurut sektor memperlihatkan kecenderungan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 8,53 persen. Pada tahun 2017 secara sektoral, sektor Korporasi Finansial mengalami

pertumbuhan tabungan bruto tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sebaliknya sektor Pemerintah mengalami penurunan tabungan bruto pada tahun 2017. Secara keseluruhan, sektor yang memiliki peranan yang paling dominan pada pembentukan tabungan bruto adalah sektor Korporasi Non Finansial. Dalam pembentukan tabungan bruto, rata-rata kontribusi sektor ini mencapai 66,89 persen selama periode 2013-2017.

Selama periode 2013-2017, struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masing-masing sektor cenderung bervariasi. Total tabungan bruto seluruh sektor terhadap PDB berkisar 33,45 hingga 34,60 persen. Jika dilihat menurut sektor, struktur tabungan bruto terhadap PDB sektor Korporasi Non Finansial paling dominan dibandingkan sektor lainnya. Selama periode tersebut, persentase pada sektor Korporasi Non Finansial berkisar antara 21,44 persen (tahun 2013) hingga 23,80 persen (tahun 2016).

Perkembangan Investasi

Pada tahun 2016, peran investasi non finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasi finansial, tetapi pada tahun 2017 terjadi perubahan struktur, investasi finansial lebih dominan. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan investasi finansial terhadap total investasi sebesar 43,4 persen dan kontribusi tersebut meningkat menjadi 59,3 persen pada tahun 2017. Peningkatan ini diakibatkan karena membaiknya kondisi keuangan global yang didukung oleh membaiknya perekonomian dan perdagangan global.

Selama periode 2013-2017 nilai total investasi Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif. Pertumbuhan total investasi mengalami kontraksi pada tahun 2013 dan 2015 dengan kontraksi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 25,11 persen. Sedangkan nilai investasi non finansial dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kecuali di tahun 2017. Tren yang berfluktuatif juga ditunjukkan oleh nilai investasi finansial selama periode 2013-2017.

Perkembangan Celah Tabungan dan Investasi (*S-I Gap*)

S-I Gap (Saving Investment Gap) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Luar Negeri (LN), jika *S-I Gap* sektor ini negatif berarti sektor LN memperoleh pinjaman dari sektor lainnya (sektor domestik). Dalam hal ini, sektor lainnya mengalami *net lending*, begitu pula sebaliknya. Selama tahun 2013-2017, sektor Korporasi Non Finansial dan Pemerintah senantiasa mengalami *net borrowing*.

Kekurangan dana tersebut dapat disediakan terutama oleh sektor Rumah Tangga. Secara umum, selama tahun 2013-2017 sektor Rumah Tangga, Korporasi Finansial, dan LNPRT merupakan sektor surplus.

Perkembangan Uang Beredar

Perkembangan jumlah uang beredar dapat dilihat dari indikator moneter seperti M1 dan M2. M1 merupakan mencakup jumlah uang kartal dan giral yang beredar di masyarakat, sedangkan M2 dikatakan uang beredar dalam arti luas karena mencakup M1 dan uang kuasi. Pada tahun 2013-2017, posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi uang kuasi. Selama periode 2013-2017 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,6 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 23,99 persen, dan sisanya sebesar 0,41 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan uang kuasi mulai menurun sejak tahun 2015. Selama periode 2013-2017, pertumbuhan uang kuasi terus mengalami penurunan, dari 13,79 persen di tahun 2014 hingga menjadi 6,82 persen di tahun 2017. Sementara disisi lain pertumbuhan M1 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 pertumbuhannya menurun dari 17,26 menjadi 12,38 persen.

Velocity of Money dan Financial Deepening Indonesia

Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) dan percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*). Sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor Keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Pada akhir tahun 2013 rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2013–2017 yaitu sebesar 39,08 persen. Namun, seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor Keuangan Indonesia, yakni (i) rendahnya intermediasi yang dilakukan oleh institusi-institusi di sektor Keuangan, (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi, dan (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Indonesia.

Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2013-2017 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 9 sampai 10,5.

<https://www.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah. Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Pada masa lalu, peranan lembaga keuangan ini kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak, penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya, belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu, sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, sejak permulaan dasawarsa 1980, pemerintah mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat keuangan lainnya di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi lebih kompleks lagi. Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif, dan konsisten, sehingga berguna sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari investasi riilnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Investasi riil merupakan investasi dalam bentuk penambahan barang modal tetap yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

Selama ini, sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Produk Domestik Bruto (PDB), Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya². Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi, dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa saja yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambarkan secara lebih jelas. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, penambahan surat hutang, penambahan pinjaman dan sebagainya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan di atas, pada tahun 1987, Badan Pusat Statistik telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas. Pada tahun 1991, NAD Indonesia 1984-1988 telah berhasil disusun untuk pertama kalinya yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun NAD Indonesia secara berkala. Sejak tahun 2016, Publikasi NAD telah mengalami perubahan bentuk format dan jenis instrumen keuangan yang disajikannya. Perubahan ini mengacu pada sistem neraca nasional terbaru yang dikenal sebagai SNA 2008. Pada masa mendatang, usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang direkomendasikan oleh PBB, System of National Accounts 2008

1.2 Maksud dan Tujuan

Publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2013-2017 merupakan realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Badan Pusat Statistik. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarkan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of income*, dan penyebab "*financial deepening*" berdasarkan data NAD 2013-2017.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori yang mendasari NAD. Selain itu, dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional serta kegunaan NAD di dalam menganalisis kegiatan ekonomi nasional.

Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.

Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2017, Perkembangan Tabungan Bruto, Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) dan Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

<https://www.bps.go.id>

BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, seperti: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta nasional, dan lain-lain. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Sektor Luar Negeri merupakan salah satu sektor yang mencatat semua transaksi antara sektor domestik dengan pihak lain luar. sehingga setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain, sehingga NAD disebut sebagai sistem yang tertutup untuk setiap transaksi. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca produksi, neraca distribusi pendapatan, neraca penggunaan pendapatan, neraca modal dan *balance sheets*. Seluruh neraca-neraca tersebut menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca produksi menggambarkan tentang kegiatan produksi barang dan jasa, neraca distribusi pendapatan merupakan neraca yang menggambarkan distribusi pendapatan primer dan sekunder diantara sektor dalam ekonomi, neraca penggunaan pendapatan menggambarkan penggunaan pendapatan atau konsumsi pemenuhan kebutuhan, neraca modal menggambarkan tentang pemupukan modal tetap atau investasi fisik sedangkan *balance sheets* menunjukkan total kekayaan sektor pada awal dan akhir periode.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu, akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan

³ Transaksi Finansial adalah penambahan atau pengurangan asset finansial dalam dalam suatu periode tertentu.

analisis ekonomi makro.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro, ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$. Umumnya, pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro biasanya lebih besar dari pengeluaran. Sebaliknya, sektor korporasi Non-Finansial umumnya merupakan sektor defisit yaitu sektor yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Dengan demikian, sektor korporasi Non-Finansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Sektor lainnya, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif. Sebaliknya, penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian, dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Dalam sistem neraca nasional (SNA 2008), neraca lengkap (*Integrated System of National Accounts*) secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) neraca pokok yaitu: neraca berjalan, neraca akumulasi dan balance sheet. Neraca berjalan mencatat kegiatan ekonomi dalam kurun waktu satu tahun. Neraca berjalan terdiri dari neraca produksi, neraca pendapatan yang dihasilkan, neraca distribusi pendapatan primer, neraca distribusi pendapatan sekunder dan neraca penggunaan pendapatan. Neraca akumulasi mencatat penambahan aset finansial/non finansial dalam kurun waktu tertentu. Neraca Akumulasi ini terdiri dari neraca modal, neraca finansial, neraca perubahan volume dan neraca perubahan harga (revaluasi). Neraca Finansial ini dikenal sebagai Neraca Arus

Dana (NAD). Sementara itu, *Balance Sheet* mencatat nilai awal dan akhir dari aset-aset baik aset finansial maupun aset non-finansial pada awal/akhir tahun.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca penggunaan pendapatan dengan neraca modal. Dari neraca penggunaan pendapatan dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen finansial baik di sisi penggunaan maupun sumber.

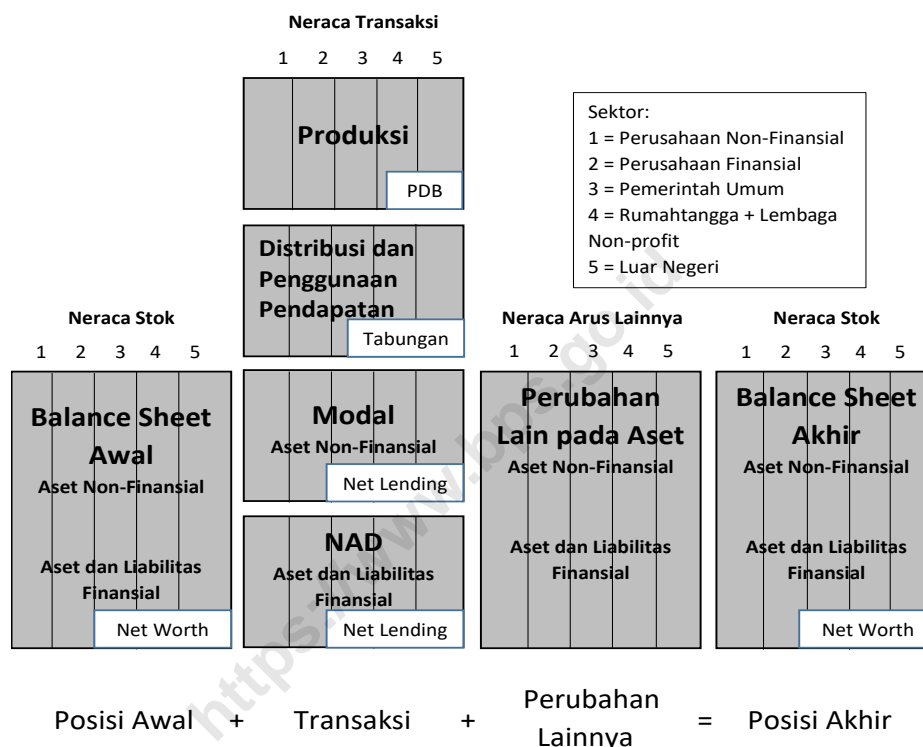
Neraca Penggunaan Pendapatan (*Use of Disposable Income Account*) merupakan salah satu dari neraca distribusi pendapatan yang menggambarkan tentang penggunaan *disposable income* (pendapatan disposable). Pendapatan *disposable* adalah total seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan dari faktor produksi (tenaga kerja dan modal) ditambah dengan pendapatan kepemilikan ditambah pendapatan dari transfer berjalan (*current transfer*) dikurangi seluruh total pengeluaran yaitu pembayaran kepemilikan dan pengeluaran transfer berjalan. Jadi pendapatan *disposable* merupakan pendapatan bersih sebelum dikurangi pengeluaran untuk konsumsi. Selisih pendapatan *disposable* dengan pengeluaran konsumsi disebut tabungan (*saving*). Neraca Penggunaan Pendapatan (*Use of Disposable Income Account*) merupakan neraca terakhir dalam kelompok neraca berjalan (*current accounts*). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Penggunaan Pendapatan selanjutnya dicatat sebagai sumber pada Neraca Modal (*Capital Account*). Neraca Modal mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Penggunaan dana untuk transaksi modal diantaranya adalah Pembentukan Modal Bruto atau harta riil yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional. Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara

tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1
Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri bahwa neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan Tabungan Bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam Neraca Modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara Tabungan Bruto yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran dengan jumlah Pembentukan Barang Modal merupakan Pinjaman Neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya Pinjaman Neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam

pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.4.1 *Pangkalan Data*

NAD merupakan suatu pangkalan data (data base), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.4.2 *Alat Analisis*

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil. Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor korporasi Non Finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.4.3 *Penerapan Teori Portfolio*

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah. Dalam model portfolio yang

lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.4.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.4.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung. Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu, paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya. Untuk menggambarkan arus finansial antarsektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu, lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antarkelompok. Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri, dan sebagainya⁴. Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi⁵. Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti Rumah Tangga, Pemerintah, dan sebagainya.

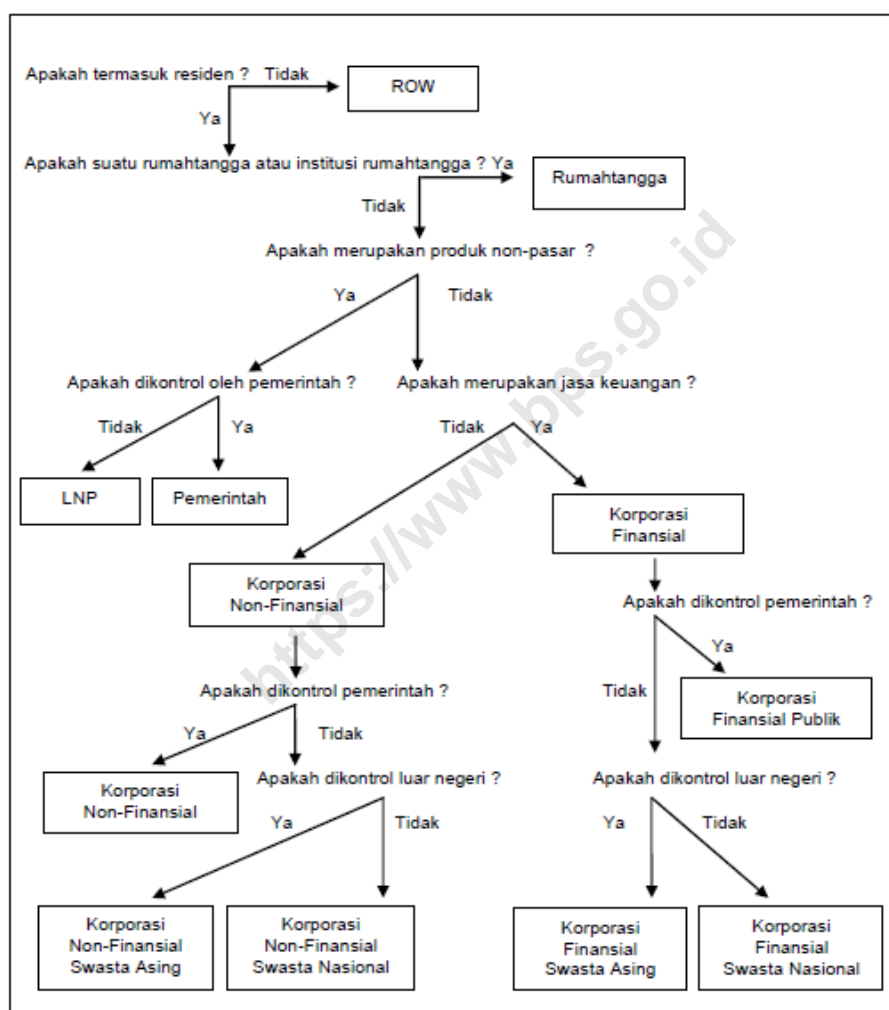
Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam-meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor-sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam enam sektor, yaitu Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, Rumah Tangga, LNPRT, dan Luar Negeri; karena keenam sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab

⁴ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari International Standard Industrial Classification (ISIC).

⁵ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Korporasi Finansial (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi Korporasi Non Finansial adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam praktiknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan. Berikut bagan pembagian sektor dalam NAD.

BAGAN 2
Pembagian Sektor dalam NAD



Penjelasan untuk masing-masing sektor institusi adalah sebagai berikut:

1. Sektor Perusahaan Non-Finansial

Perusahaan non-finansial adalah perusahaan yang aktivitas utamanya memproduksi barang atau jasa non-finansial. Selain itu, perusahaan non-finansial juga mencakup lembaga non-profit (LNP) yang menghasilkan barang/jasa dengan harga pasar seperti rumah sakit, sekolah, atau perguruan tinggi. Perusahaan non-finansial juga termasuk asosiasi bisnis yang dibiayai

perusahaan non-finansial atau *un-incorporated enterprises* yang berperan mempromosikan dan melayani kepentingan enterprise.

2. Sektor Perusahaan Finansial

Sektor Perusahaan Finansial mencakup seluruh perusahaan residen yang aktivitas utamanya menyediakan jasa keuangan, termasuk jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun, serta unit yang memfasilitasi perantara keuangan. Selain itu sektor perusahaan keuangan juga mencakup Lembaga Non Profit (LNP) yang menghasilkan jasa keuangan. LNP keuangan ini biasanya dibiayai oleh pelanggan enterprise finansial yang berperan dalam mempromosikan dan melayani kepentingan enterprisinya.

3. Sektor Pemerintah

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), serta pemerintah desa dan badan jaminan sosial (*social security funds*) yang dikendalikan oleh pemerintah. Termasuk juga LNP yang menghasilkan barang/jasa non-pasar yang dikendalikan unit pemerintah. Namun dalam publikasi ini hanya dicakup sektor pemerintah pusat saja.

4. Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

Sektor LNPRT terdiri dari seluruh LNP residen (kecuali yang dikendalikan oleh pemerintah) yang menghasilkan barang atau jasa non-pasar untuk rumah tangga atau masyarakat luas.

5. Sektor Rumah Tangga

Rumah Tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang menggunakan tempat tinggal bersama, menyatukan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya serta mengkonsumsi barang dan jasa tertentu secara kolektif, utamanya perumahan dan makanan. Masing-masing anggota rumah tangga punya klaim atas sumber daya kolektif rumah tangga, paling tidak, keputusan yang mempengaruhi konsumsi atau flow ekonomi lain diambil untuk rumah tangga secara keseluruhan.

Sektor Rumah Tangga terdiri dari seluruh rumah tangga residen, termasuk institusi rumah tangga yang terdiri dari kelompok individu yang tinggal di rumah sakit, panti jompo, biara, penjara, dan sejenisnya untuk periode yang cukup lama. Seperti telah dicatat, bahwa suatu unit usaha (*un-incorporated enterprises*) milik rumah tangga (usaha rumah tangga) diperlakukan sebagai bagian integral dari rumah tangga bukan merupakan bagian yang terpisah dari rumah tangga, kecuali jika pembukuan cukup detail dalam mencatat aktivitas yang dilakukan, yang akan diperlakukan sebagai kuasi korporasi.

Selain unit institusional residen yang dialokasikan pada kelima sektor institusi

tersebut, ada juga unit institusional non-residen yang bertransaksi dengan unit residen. Unit tersebut disebut sebagai sektor luar negeri. Tidak seperti unit residen yang dibagi menjadi beberapa sektor, unit non residen seluruhnya dikelompokkan dalam satu sektor yaitu sektor luar negeri

Dari ke lima sektor institusi di atas masing-masing dapat dibagi lagi ke dalam sub-sektor. Tidak ada cara tunggal yang digunakan dalam mengalokasi ke dalam sub-sektor untuk semua tujuan atau semua negara, sehingga dalam men-sub-sektor dapat digunakan cara yang berbeda. Membagi total ekonomi ke dalam sektor dimaksudkan untuk meningkatkan kegunaan neraca di dalam analisis ekonomi, dengan cara mengelompokkan unit institusi sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Sektor dan sub-sektor juga diperlukan dalam targetting atau monitoring kelompok tertentu dalam suatu rencana kebijakan. Contoh, sektor Rumah Tangga dibagi ke dalam sub-sektor agar dapat mengamati kelompok masyarakat yang dipengaruhi atau mendapatkan manfaat dari proses pembangunan, kebijakan ekonomi pemerintah, atau langkah-langkah kebijakan sosial. Pembagian sektor ke dalam sub-sektor tergantung pada: jenis analisis yang akan dilakukan, kebutuhan pembuat kebijakan, ketersediaan data, dan kondisi ekonomi dan pengaturan institusi di dalam suatu negara.

Sub-sektor dari masing-masing sektor institusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sektor Perusahaan Non-Finansial

Terdapat dua kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi sub-sektor di dalam sektor perusahaan non-finansial. Salah satu kriteria menunjukkan LNP yang terpisah dari unit dalam sektor ini. Unit LNP itu digambarkan sebagai LNP bisnis non-finansial (FPIs). Kriteria ke dua menunjukkan unit pengendali yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perusahaan non-finansial publik,
- b. Perusahaan non-finansial swasta nasional, dan
- c. Perusahaan non-finansial yang dikendalikan pihak asing

2. Sektor Perusahaan Finansial

Perusahaan finansial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan perantara keuangan, Perusahaan penunjang jasa keuangan, dan keuangan lainnya. Perusahaan perantara keuangan adalah unit institusi yang memperoleh aset finansial dengan terlibat dalam transaksi finansial di pasar uang. Di dalamnya termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun. Perusahaan penunjang jasa keuangan adalah unit institusi yang terlibat dalam melayani pasar uang, tetapi tidak mengambil alih kepemilikan aset dan kewajiban finansial yang dilakukannya. Perusahaan finansial lainnya adalah unit institusi yang menyediakan jasa keuangan, di mana sebagian besar aset atau kewajibannya tidak ditransaksikan

di pasar uang secara terbuka.

Sektor Perusahaan Finansial dibagi menjadi sembilan sub-sektor sesuai dengan jenis aktivitas di pasar dan likuiditas dari kewajibannya. Sembilan sub-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah institusi keuangan nasional yang bertugas mengendalikan seluruh aspek kunci dari sistem keuangan.

b. Korporasi Depositori selain Bank Sentral

Korporasi depository di luar bank sentral, melakukan kegiatan perantara keuangan sebagai aktivitas utamanya. Untuk tujuan ini, mereka memiliki kewajiban dalam bentuk deposito atau instrumen finansial lain (seperti sertifikasi deposito jangka pendek).

c. Dana Pasar Uang (*MMFs*)

Dana pasar uang (*MMFs*) adalah skema investasi kolektif yang menghimpun dana dengan menerbitkan saham atau *unit investasi* pada publik. Hasilnya diinvestasikan dalam instrumen pasar uang, saham, atau *unit MMFs*, instrumen hutang yang dapat diperjual belikan dengan sisa jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, deposito bank, dan instrumen yang menghasilkan tingkat pengembalian mendekati suku bunga instrumen pasar uang. Saham *MMFs* dapat di-pindah-tangan-kan secara langsung pada pihak ketiga melalui cek atau sarana lain, karena sifat skema instrumen investasi, saham, atau *units*, *MMFs* dianggap sebagai *close substitutes* untuk deposito.

d. Dana Investasi *non-MMFs*

Dana investasi *non-MMFs* adalah skema investasi kolektif yang menghimpun dana dengan cara menerbitkan saham atau *units* pada publik. Hasilnya diinvestasikan dalam bentuk aset finansial selain aset jangka pendek dan dalam aset non-finansial (umumnya *real estate*).

e. Intermediasi Keuangan Lain, kecuali Asuransi dan Dana Pensiun (*ICPFs*)

Intermediasi keuangan lain kecuali asuransi dan dana pensiun terdiri dari Perusahaan Finansial yang kegiatan usahanya menyediakan jasa finansial dengan menerbitkan kewajiban dalam bentuk selain mata uang, deposito, atau *close substitutes* untuk deposito pada rekening mereka sendiri guna memperoleh aset finansial yang dapat ditransaksikan di pasar uang.

f. Penunjang Jasa Keuangan

Penunjang jasa keuangan terdiri dari Perusahaan Finansial yang utamanya terkait dalam aktivitas transaksi aset dan kewajiban finansial, atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk transaksi ini, tetapi dalam kondisi tertentu yang tidak termasuk dalam penunjang untuk mengambil pemilikan

aset dan kewajiban finansial yang ditransaksikan itu.

g. *Institusi Captive Financial dan Money Lenders*

Institusi captive financial dan money lenders terdiri dari unit institusi yang memberi jasa keuangan di mana sebagian besar aset dan kewajibannya tidak ditransaksikan dalam pasar uang terbuka.

h. *Perusahaan Asuransi*

Perusahaan asuransi, terdiri dari usaha berbadan hukum, entitas mutual, dan entitas lain, yang fungsi utamanya adalah menyediakan jasa asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, kebakaran atau bentuk lain bagi individu atau kelompok unit institusi; atau jasa reasuransi bagi perusahaan asuransi lain.

i. *Dana Pensiun*

Kewajiban pensiun akan muncul ketika pemberi kerja atau pemerintah mewajibkan atau menganjurkan kepada anggota rumahtangga untuk berpartisipasi dalam skema jaminan sosial yang akan memberikan pendapatan kepada para pensiunan. Skema jaminan sosial bisa diorganisir oleh pemberi kerja atau pemerintah ataupun oleh perusahaan asuransi untuk kepentingan anggotanya. Skema jaminan sosial tersebut harus merupakan institusi yang terpisah dari institusi yang membawahnya.

3. *Sektor Pemerintah*

Peng-subsektor-an pemerintah membolehkan unit LNP pemerintah dan dana jaminan sosial dikeluarkan untuk masing-masing pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa.

- a. *Pemerintah Pusat;*
- b. *Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);*
- c. *Pemerintah Desa;*
- d. *Dana Jaminan Sosial;*

4. *Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga*

LNPRT jenis pertama terdiri dari LNP yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghasilkan barang jasa untuk kepentingan anggota. Jasa disediakan secara gratis dan dibiayai oleh anggota secara reguler. LNP semacam ini termasuk ke dalam sektor LNPRT seperti organisasi profesi, partai politik, serikat dagang, tempat ibadah, organisasi agama, sosial, dan budaya, tempat rekreasi atau klub olahraga amatir; tidak termasuk lembaga serupa yang dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan LNPRT jenis ke dua terlibat dalam aktivitas bantuan (charities), relief, atau agen bantuan yang didirikan untuk tujuan filantropis, serta tidak melayani kepentingan anggota yang mengendalikan LNPRT. Seperti LNPRT yang menyediakan barang dan jasa pada basis non-pasar untuk kepentingan rumah tangga, seperti rumah tangga yang terkena bencana alam

atau perang. LNPRT jenis yang ke tiga mencakup yang menyediakan jasa kolektif seperti unit penelitian yang hasilnya tersedia gratis, kelompok lingkungan, dll. Jenis LNPRT ini lebih tidak umum dari jenis LNPRT sebelumnya, dan mungkin tidak selalu tampil secara signifikan di suatu negara.

5. Sektor Rumah Tangga

Sektor Rumah Tangga terdiri dari seluruh unit rumah tangga residen. Ada banyak cara di mana sektor Rumah Tangga di-sub-sektor-kan, dan statistisi memberi pertimbangan pada berbagai kemungkinan. Lebih dari satu metode diadopsi jika ada suatu permintaan untuk pemecahan masalah yang berbeda dari sektor Rumah Tangga oleh pengguna data, analis, atau pengambil kebijakan. Rumah Tangga dapat dikelompokkan ke dalam sub-sektor sesuai sumber pendapatan terbesar. Metode lainnya di dalam pembentukan sub-sektor memerlukan seseorang sebagai referensi yang diidentifikasi untuk setiap rumah tangga.

6. Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia, data untuk sektor Luar Negeri diperoleh dari Bank Indonesia. Data tersebut diperoleh dari transaksi luar negeri yang ada pada Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*) dan Posisi Investasi Internasional (*International Investment Position/IIP*). Kedua neraca tersebut diperoleh dari Publikasi resmi Bank Indonesia. Neraca BoP dan IIP secara konsep sudah sesuai dengan SNA 2008 karena disusun menurut manual yang terbaru yaitu BoP manual 6.

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 Pembagian Kategori Transaksi

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the the line*). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Aset (harta) Non-Finansial yang dalam istilah lain disebut investasi riil. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua yaitu Penyusutan Barang Modal dan Tabungan Neto. Sedangkan Perolehan Aset Non-Finansial terdiri dari Aset yang dapat diproduksi (*produced assets*) dan aset yang tidak dapat diproduksi (*non produced assets*). *Produced assets* terdiri dari aset tetap (*fixed assets*) atau barang modal, perubahan stok, dan perolehan barang berharga. Sedangkan contoh dari *non produced assets* adalah tanah. Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi, karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus). Sebaliknya, jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Nilai pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya, jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian, terdapat lima baris penunjang yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Jika pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, Cadangan Asuransi dan Dana Pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor Asuransi dan Dana Pensiun. Untuk itu pembagian transaksi finansial dalam NAD dikelompokkan ke dalam beberapa instrumen finansial sbb:

1. Emas Moneter dan SDRs

- a. Emas moneter

Emas moneter merupakan emas yang dipegang dalam penguasaan otoritas moneter (atau pihak lain yang tunduk pada kontrol efektif dari otoritas moneter). Emas moneter ini dipegang oleh otoritas moneter tersebut sebagai cadangan devisa. Emas moneter terdiri dari emas batangan (emas dalam bentuk secara fisik) dan dalam bentuk non fisik (hak claims pengiriman emas pada otoritas

moneter non-residen).

b. SDRs atau Hak Tarik Khusus

Special Drawing Rights (SDRs) merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasi pada anggotanya untuk melengkapi cadangan aset yang ada. *Department of Special Drawing Rights IMF* mengelola cadangan aset dengan mengalokasi SDRs di antara negara anggota IMF dan badan internasional (secara kolektif dikenal sebagai peserta).

2. Uang Tunai dan Simpanan

a. Uang tunai

Uang tunai terdiri dari uang kertas dan koin dengan nilai nominal yang tetap dan diterbitkan atau di bawah otoritas bank sentral atau pemerintah (koin *commemorative* yang tidak beredar harus dikeluarkan, sebagaimana yang belum diterbitkan, atau uang tunai *demonetized*). Suatu perbedaan harus tergambar antara mata uang domestik (yaitu mata uang yang menjadi kewajiban unit residen, seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah pusat) dan mata uang asing yang merupakan kewajiban unit non-residen (seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah dari negara lain).

b. *Transferable Deposits*

Transferable Deposits (simpanan yang mudah dicairkan) terdiri dari seluruh simpanan yang:

- i. dapat ditukarkan dengan uang kertas dan uang logam atas permintaan pada nilai nominal dan tanpa penalty atau pembatasan; dan
- ii. dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, wesel, giro order, debet/kredit langsung, atau fasilitas pembayaran langsung lainnya.

Transferable Deposits dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Simpanan antar bank

Simpanan antar bank umumnya dapat diidentifikasi dan berfungsi sebagai pencatatan instrumen keuangan secara terpisah. Ini merupakan salah satu alasan dalam memisahkan pinjaman dan simpanan antar bank dari pinjaman dan simpanan lainnya. Alasan lain lebih kepada penghitungan biaya jasa perantara keuangan yang diukur tidak langsung (FISIM).

2. *Other Transferable Deposits*

Other Transferable Deposits adalah salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi, atau baik kreditur/debitur atau kedua duanya bukan merupakan institusi perbankan.

c. Simpanan lainnya

Simpanan lainnya terdiri dari seluruh klaim, selain *transferable deposits* yang ditunjukkan dengan bukti simpanan. Bentuk simpanan tertentu yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tabungan (yang selalu tidak mudah dicairkan), deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kategori ini juga mencakup bukti simpanan semacam itu yang diterbitkan asosiasi tabungan dan pinjaman, pembangunan masyarakat, serikat kredit dll. Simpanan dengan kemampuan pemindahbukuan terbatas, yang tidak termasuk dalam kategori *transferable deposits* masuk dalam kategori ini. Klaim terhadap IMF yang merupakan komponen cadangan devisa dan tidak dibuktikan melalui pinjaman, dicatat dalam bentuk simpanan lain. (Klaim pada IMF yang dibuktikan melalui pinjaman, harus masuk dalam pinjaman). Pembayaran marjin yang dibayar tunai terkait kontrak finansial derivatif (seperti dalam penjelasan di bawah), termasuk dalam simpanan lain, seperti halnya overnight dan perjanjian membeli kembali jangka sangat pendek jika dianggap bagian dari definisi uang nasional yang diperluas. Perjanjian membeli kembali lainnya diklasifikasi sebagai pinjaman.

3. Surat Hutang (*Debt Securities*)

Surat hutang atau sekuritas hutang merupakan *negotiable instruments* yang memberikan suatu bukti hutang. Surat hutang mencakup tagihan, obligasi, sertifikat simpanan yang *negotiable, commercial paper, debentures, aset backed securities*, dan instrumen sejenis yang umum diperdagangkan di pasar keuangan. Sekuritas hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Sekuritas hutang jangka pendek, mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* satu tahun atau kurang. Sekuritas dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang diklasifikasi sebagai jangka pendek.
- b. Sekuritas hutang jangka panjang mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* lebih dari satu tahun. Klaim dengan tanggal jatuh tempo *optional* terakhirnya lebih dari satu tahun dan klaim dengan tanggal jatuh tempo tidak terbatas, diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

4. Pinjaman

Pinjaman merupakan aset finansial yang:

- a. Dibuat saat kreditur meminjamkan dana secara langsung pada debitur, dan
- b. Dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat diperdagangkan.

Pinjaman dapat dibagi lagi atas basis pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Pinjaman jangka pendek terdiri dari pinjaman yang mempunyai original jatuh tempo satu tahun atau kurang. Pinjaman yang dibayar kembali atas permintaan kreditur diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan ketika pinjaman itu diharapkan berumur lebih dari setahun.
 - b. Pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman yang mempunyai masa jatuh tempo lebih setahun.
5. Ekuitas dan Unit investasi bersama
- a. Ekuitas

Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan pengakuan atas klaim pada suatu korporasi atau kuasi-korporasi setelah seluruh klaim dari seluruh kreditur dipenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai kewajiban dari unit institusi yang menerbitkannya.

Ekuitas dibagi lagi menjadi:

 - i. Saham terdaftar

Saham terdaftar merupakan saham yang diperdagangkan di pasar bursa.
 - ii. Saham tidak terdaftar

Saham tidak terdaftar merupakan saham yang tidak diperdagangkan di bursa saham.
 - iii. Ekuitas lainnya

Ekuitas lainnya merupakan ekuitas selain saham.
 - b. Unit Investasi Bersama

Unit investasi bersama merupakan investasi kolektif yang berlangsung jika para investor mengumpulkan dana untuk diinvestasi pada aset finansial atau aset non-finansial.

 - i. Investasi bersama saham (Saham MMF)

MMF merupakan dana investasi yang utamanya diinvestasikan di dalam pasar uang sekuritas jangka pendek *seperti treasury bills, certificates of deposit, dan commercial paper*. MMF terkadang secara fungsional mirip dengan *transferable deposits*, seperti akun dengan hak mengeluarkan cek yang terbatas. Jika investasi bersama saham tersebut termasuk uang beredar dalam pelaporan ekonomi, mereka dicatat sebagai bagian yang terpisah dengan statistik moneter. Saham atau unit MMF merepresentasi suatu klaim yang proporsional atas nilai MMF yang dibentuk.
 - ii. Dana investasi bersama selain saham

Dana investasi bersama selain saham atau unit menggambarkan klaim atas suatu proporsi nilai dana investasi yang dibentuk selain dari dana pasar uang.
6. Cadangan Tehnis Asuransi dan Dana Pensiun

- a. Cadangan teknis asuransi non-jiwa
Cadangan teknis asuransi non-jiwa terdiri dari pembayaran di muka atas premi asuransi non-jiwa dan cadangan neto guna memenuhi klaim asuransi non-jiwa yang mungkin terjadi.
 - b. Hak asuransi jiwa dan jaminan hari tua
Hak asuransi jiwa dan jaminan hari tua memperlihatkan perluasan klaim finansial milik pemegang polis yang ditawarkan oleh suatu perusahaan asuransi jiwa atau yang menyediakan jaminan hari tua. Hanya transaksi untuk asuransi jiwa dan jaminan hari tua yang dicatat pada neraca finansial, yakni selisih antara premi bersih yang diterima dan klaim yang dibayar.
 - c. Hak pensiun
Hak pensiun menunjukkan perluasan klaim finansial yang dipegang pensiunan di masa kini dan di masa mendatang terhadap pemberi kerja atau terhadap suatu pendanaan yang ditunjuk pemberi kerja untuk membayar pendapatan pensiun sebagai bagian dari perjanjian kompensasi antara pemberi kerja dan pekerja. Transaksi Hak pensiun yang dicatat pada neraca finansial adalah selisih bersih antara kontribusi yang diterima dan manfaat yang dibayarkan.
7. Finansial *Derivative* dan Opsi Saham Pekerja
- a. Finansial *derivatives*
Finansial *derivatives* merupakan instrumen finansial yang *underlyingnya* instrumen finansial lain, indikator atau komoditas, dimana risiko finansialnya diperdagangkan secara terpisah.
 - b. Kontrak Opsi Saham (KOS)
KOS merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli, untuk membeli (call option) atau menjual (put option) atas instrumen finansial tertentu atau komoditas pada harga yang ditentukan sebelumnya ("*strike price*") dalam jangka waktu tertentu. Option dijual dalam berbagai jenis *underlying* asset seperti ekuitas, suku bunga, mata uang asing, komoditas, dan indeks tertentu.
 - c. *Forward*
Suatu kontrak *forward* merupakan kontrak finansial tanpa syarat yang merupakan kewajiban untuk diselesaikan pada tanggal yang ditentukan. Kontrak *forward* dan kontrak *forward* lain biasanya diselesaikan melalui pembayaran tunai atau penyediaan instrumen finansial lainnya dibanding pengiriman aktual dari asset yang diperdagangkan. Oleh karena itu *forward* diperdagangkan secara terpisah dari asset yang menjadi *underlying* nya.
 - d. Opsi saham pekerja (*employee stock options* atau ESOs)
Opsi saham pekerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal tertentu (the "*grant*" date) dimana seorang pekerja dapat membeli sejumlah

saham pemberi kerja pada harga yang ditentukan (the “*strike price*”) baik pada saat tertentu (the “*vesting*” date) atau di dalam periode (the *exercise period*) segera setelah tanggal pemberian hak opsi.

8. Tagihan lainnya

a. Kredit dagang dan uang muka

Kategori ini terdiri dari kredit dagang barang dan jasa yang diberikan pada korporasi, pemerintah, LNPRT, Rumah Tangga dan Luar Negeri, serta uang muka untuk pekerjaan yang sedang berlangsung (jika diklasifikasi sebagai inventori) atau hal ini telah dan sedang berlangsung. Kredit dagang dan uang muka tidak mencakup kredit untuk membiayai kredit dagang yang diklasifikasi sebagai pinjaman.

b. Lainnya

Kategori ini mencakup penerimaan dan pembayaran selain yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah yang tidak berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Kategori ini mencakup jumlah yang terkait dengan pajak, dividen, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, dan kontribusi sosial. Bunga yang diperoleh namun tidak dibayarkan termasuk dalam item ini, hanya jika bunga yang diperoleh tidak ditambahkan pada nilai aset yang mana bunga dibayar (seperti yang biasa terjadi).

3.2 Sumber Data dan Metode Penyusunan

Dalam penyusunan NAD Indonesia, untuk sektor-sektor domestik digunakan metode penghitungan menurut kesimbangan transaksi yang dikeluarkan dan diterima oleh sektor-sektor dalam ekonomi sedangkan transaksi antara residen dan non-residen yang tergabung dalam sektor Luar Negeri dihitung secara tersendiri. Data ini diambil dari publikasi BoP dan IIP yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penghitungan keimbangan instrumen dihitung dengan metode yang berbeda-beda untuk setiap instrumen maupun sektor finansial yang ada. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing metode penghitungannya:

3.2.1 Penyusunan Arus Transaksi Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antarsektor ekonomi selama satu periode tertentu (triwulan/tahun). Dalam praktik, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu, arus finansial untuk suatu periode tertentu bisa negatif atau positif. Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang

ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya, arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

Untuk penyusunan masing masing instrumen finansial akan dijelaskan pada pada keterangan dibawah ini:

3.2.1.1 Metodologi Penyusunan Emas Moneter

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI). Data yang digunakan berasal dari sebagian nilai cadangan devisa dalam tiap triwulan. Tahapan penghitungan emas moneter dimulai dengan menggunakan proporsi dari kenaikan/penurunan cadangan devisa. Setelah itu, dilakukan konversi satuan ke IDR dengan menggunakan kurs transaksi karena angka transaksi tersebut masih dalam satuan USD. Kemudian pisahkan total penambahan emas moneter dari kenaikan harganya.

3.2.1.2 Metodologi Penyusunan Hak Tarik Khusus

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan hak tarik khusus berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) sektor eksternal. Tahapan penghitungan Hak Tarik Khusus ini sama dengan metode penghitungan emas moneter hanya berbeda di instrumen finansialnya aja.

3.2.1.3 Metodologi Penyusunan Uang

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data yang digunakan mencakup uang kartal yang diedarkan. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan uang dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan penambahan/penurunan data uang kartal yang diedarkan. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada uang dialokasikan pada sektor Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, dan Rumah Tangga.

3.2.1.4 Metodologi Penyusunan *Transferable Deposits*

Jenis *transferable deposits* yang dimaksud mencakup *interbank position* dan *other transferable deposits*. Untuk *interbank position*, sumber data yang digunakan

berasal dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya, sedangkan untuk *other transferable deposits*, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi OJK dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia.

Tahapan penghitungan *interbank position* dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi antar bank. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada *interbank position* juga dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Finansial.

Tahapan penghitungan *other transferable deposits* dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi giro. Untuk giro dalam bentuk rupiah, nilai transaksi sama dengan nilai total *flow*, sedangkan untuk giro dalam bentuk valas, akan dikeluarkan terlebih dahulu nilai *flow* akibat *exchange rate*. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung transaksi pada giro dalam bentuk valas adalah sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Exchange Rate}_n$$

Nilai transaksi tersebut baik giro dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada *interbank position* dialokasikan pada semua sektor kecuali sektor Luar Negeri.

3.2.1.5 Metodologi Penyusunan Simpanan Lainnya

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya, dan Laporan Realisasi APBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulannya. Data yang digunakan mencakup data *other investment*, tabungan, deposito, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan simpanan lainnya dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data *other investment*, tabungan, deposito, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri. Untuk tabungan dan deposito dalam bentuk rupiah, nilai transaksi sama dengan nilai total *flow*, sedangkan untuk tabungan dan deposito dalam bentuk valas, akan

dikeluarkan terlebih dahulu nilai *flow* akibat *exchange rate*. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung transaksi pada tabungan dan deposito dalam bentuk valas adalah sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Price Change}_n$$

Nilai transaksi tersebut baik tabungan dan deposito dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada simpanan lainnya dialokasikan pada semua sektor kecuali sektor Luar Negeri.

3.2.1.6 Metodologi Penyusunan Surat Berharga

Jenis surat berharga yang dimaksud mencakup surat berharga jangka pendek dan surat berharga jangka panjang. Untuk surat berharga jangka pendek, sumber data yang digunakan berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, posisi surat berharga negara yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya, dan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya. Sedangkan untuk surat berharga jangka panjang, sumber data yang digunakan berasal dari posisi surat berharga negara yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya.

Tahapan penghitungan surat berharga jangka pendek dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial dan pemerintah. Sementara itu, isian sisi asset pada surat berharga jangka pendek dialokasikan pada semua sektor dengan proporsi tertentu.

Tahapan penghitungan surat berharga jangka panjang mirip seperti tahapan penghitungan surat berharga jangka pendek, yaitu dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor pemerintah dan Luar Negeri. Sementara itu, isian sisi asset pada surat berharga jangka panjang dialokasikan pada semua sektor dengan proporsi tertentu.

3.2.1.7 Metodologi Penyusunan Pinjaman

Jenis pinjaman yang dimaksud mencakup pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Untuk pinjaman jangka pendek, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Surat Utang Luar

Negeri (SULNI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang, sumber data yang digunakan berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, Surat Utang Luar Negeri (SULNI), posisi utang pemerintah pusat yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya, dan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya.

Tahapan penghitungan pinjaman jangka pendek dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada semua sektor kecuali LNPRT dan Luar Negeri dengan proporsi tertentu. Sementara itu, isian sisi asset pada pinjaman jangka pendek dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Finansial dan Luar Negeri.

Tahapan penghitungan pinjaman jangka panjang mirip seperti tahapan penghitungan pinjaman jangka pendek, yaitu dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada semua sektor dengan proporsi tertentu. Sementara itu, isian sisi asset pada pinjaman jangka panjang dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial dan Luar Negeri.

3.2.1.8 Metodologi Penyusunan Ekuitas

Sumber data yang digunakan berasal dari data KSEI dan IDX. Data yang dikumpulkan berupa data *issuer/penerbit* ekuitas, data *holder/pemegang* ekuitas, data *amount outstanding* pada harga pasar, dan data IHSG harian. Data *issuer/penerbit* ekuitas didapatkan dari data master file efek di KSEI yang diterbitkan setiap bulannya, dimana data master file efek tersebut mencatat harga dan jumlah ekuitas yang dikeluarkan/diterbitkan oleh seluruh perusahaan. Kemudian, data *holder/pemegang* ekuitas didapatkan dari data kepemilikan efek di KSEI yang diterbitkan setiap bulannya, dimana data kepemilikan efek tersebut mencatat harga dan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan, data *amount outstanding* pada harga pasar didapatkan melalui publikasi *IDX Quarterly Statistics* yang diterbitkan oleh IDX setiap triwulannya.

Jenis ekuitas yang dihitung ada 3, yaitu ekuitas terdaftar, ekuitas tidak terdaftar untuk perusahaan terdaftar, dan ekuitas tidak terdaftar untuk perusahaan tidak terdaftar. Penghitungan instrumen ekuitas menggunakan *framework from whom to whom*. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi. Tahapan penghitungan ekuitas terdaftar

dimulai dengan melakukan *mapping*/identifikasi jenis perusahaan baik dari sisi *issuer* maupun sisi *holder* ke dalam klasifikasi perusahaan finansial (FC) atau perusahaan non finansial (NFC). Setelah itu, dilakukan penghitungan nilai *amount outstanding* untuk setiap jenis perusahaan baik dari sisi *issuer* maupun sisi *holder*. Setelah nilai *amount outstanding* untuk setiap jenis perusahaan didapat, maka nilai tersebut akan dialokasikan untuk tiap sektor institusi di KSEI. Untuk mendapat nilai transaksi, maka perlu dipisahkan nilai *flow* akibat *price change*.

Nilai *flow* akibat *price change* dihitung dengan menggunakan selisih nilai *amount outstanding* dari dua periode data yang dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan. Kemudian setelah itu, nilai transaksi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Price Change}_n$$

Setelah semua nilai transaksi untuk setiap sektor institusi di KSEI diperoleh, maka dilakukan mapping sektor institusi di KSEI ke sektor institusi di NAD.

Menurut SNA 2008 dan BPM 6, ada 6 metode yang dapat dilakukan untuk menghitung nilai ekuitas tidak terdaftar. Didalam NAD ini, metode penghitungan yang digunakan adalah metode *own funds at book value* (OFBV). Metode ini membandingkan nilai *own funds* dari korporasi tidak terdaftar dengan korporasi terdaftar. Adapun formulanya sebagai berikut:

$$\text{Nilai share tidak terdaftar} = \text{harga pasar dari share terdaftar yang sama} \times \frac{\text{own funds dari korporasi tidak terdaftar}}{\text{own funds dari korporasi terdaftar yang sama}}$$

3.2.1.9 Metodologi Penyusunan *Money Market Fund* (MMF) & *Non Money Market Fund* (NonMMF)

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Pasar Modal yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap minggu terakhir pada akhir periode triwulanan seperti akhir Maret, akhir Juni, akhir September, dan akhir Desember. Data yang digunakan mencakup Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana per Jenis, Komposisi Kepemilikan Efek Asing/Lokal yang Tercatat di KSEI, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penilaian yang digunakan adalah *transaction value*. Tahapan penghitungan dimulai dengan memperoleh angka triwulanan dari selisih antara dua periode data kemudian angka tahunan merupakan jumlah dari 4 triwulan.

Pada penghitungan MMF, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Jenis Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode dijumlahkan kemudian dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan untuk sisi

Liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sedangkan pada sisi Asset jumlah NAB Jenis Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode didistribusikan menurut sektor berdasarkan proporsi Komposisi Kepemilikan Efek Asing/lokal yang Tercatat di KSEI. Kemudian hasil proporsi tersebut dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan untuk sisi Asset pada sektor Rumah Tangga, Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, LNPRT, dan Luar Negeri. Selanjutnya, angka tahunan baik untuk sisi Liabilitas maupun sisi Asset diperoleh dari jumlahan 4 triwulan.

Penghitungan NonMMF sedikit berbeda dengan MMF, NAB Reksa Dana yang dijumlahkan pada masing-masing periode adalah jenis selain Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang kemudian dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan. Selanjutnya angka triwulanan tersebut dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan untuk mendapatkan nilai NonMMF sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial yang telah berdasarkan *transaction value*. Sedangkan pada sisi Asset jumlah NAB Jenis selain Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode didistribusikan menurut sektor berdasarkan proporsi Komposisi Kepemilikan Efek Asing/lokal yang Tercatat di KSEI. Kemudian hasil proporsi tersebut dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan. Sama halnya dengan penghitungan pada sisi liabilitas, untuk mendapatkan nilai NonMMF untuk sisi Asset pada *transaction value* maka angka triwulanan menurut sektor tersebut dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan. Selanjutnya, angka tahunan baik untuk sisi Liabilitas maupun sisi Asset diperoleh dari jumlah 4 triwulan.

3.2.1.10 Metodologi Penyusunan Asuransi Jiwa & Asuransi Non Jiwa

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Perasuransian yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tahunan. Data yang digunakan adalah jumlah cadangan teknis menurut jenis asuransi. Cadangan teknis asuransi jiwa terdiri dari asuransi jiwa; program asuransi untuk PNS/TNI/POLRI; dan asuransi jiwa syariah. Sementara itu, cadangan teknis asuransi non jiwa terdiri dari usaha asuransi kerugian dan resuransi; program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja; serta usaha asuransi dan reasuransi syariah.

Penghitungan asuransi jiwa maupun asuransi non jiwa dilakukan secara tahunan diperoleh dari selisih dua periode data cadangan teknis. Nilai *flow transaction* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada asuransi jiwa dialokasikan hanya pada sektor rumah tangga, sedangkan sisi asset untuk asuransi non jiwa dialokasikan pada sektor rumah tangga, Korporasi Non

Finansial, dan Korporasi Finansial dengan proporsi tertentu.

3.2.1.11 Metodologi Penyusunan Dana Pensiun

Data yang digunakan bersumber dari Laporan Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun dan Statistik dana Pensiun yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu nilai Aktiva/Aset Bersih. Penghitungan dana pensiun dilakukan secara tahunan yang diperoleh dari selisih dua periode data nilai aktiva/asset bersih. Nilai *flow transaction* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada asuransi jiwa dialokasikan hanya pada sektor rumah tangga.

3.2.1.12 Metodologi Penyusunan *Financial Derivatives*

Data transaksi finansial derivatives sangat terbatas sehingga saat ini NAD Indonesia hanya mencatat transaksi yang terdapat dalam BoP.

3.2.1.13 Metodologi Penyusunan Hutang/Piutang Lainnya

Hutang/piutang lainnya mencakup semua transaksi yang tidak termasuk dalam kategori yang tersebut diatas.

3.2.2 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Pada dasarnya, rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

3.2.3 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Umumnya, data tersebut diperoleh dalam bentuk laporan/publikasi institusi luar yang mempunyai konsep dan neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses klasifikasi yang sering kali berbeda dengan konsep neraca nasional serta kurangnya cakupan data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan kepemilikan instrumen instrumen tersebut. Masalah lain adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi

NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah ketiga adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai. Bahkan, itu disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode. Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan, maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NAD INDONESIA TAHUN 2013-2017

4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2017

Perekonomian global pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 3,7 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,2 persen. Hal ini pada umumnya didorong oleh membaiknya pertumbuhan di negara-negara maju sedangkan di negara-negara berkembang mencatat pertumbuhan yang tetap stabil. Secara umum kinerja perekonomian di negara-negara maju menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 1,7 persen pada tahun 2016 menjadi 2,4 persen pada tahun 2017, sedangkan perekonomian negara berkembang dan *emerging market* mencatat pertumbuhan sebesar 4,7 persen. Peningkatan kegiatan ekonomi yang dialami negara maju didukung oleh membaiknya laju pertumbuhan Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, dan Kanada, sedangkan Spanyol dan Inggris mengalami penurunan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 3,1 dan 1,7 persen. Sementara itu, pada tahun 2017 perekonomian negara berkembang dan *emerging market* mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 4,4 persen.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07 persen, sedikit membaik dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Kondisi tersebut didorong oleh kuatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi fisik serta kinerja ekspor yang membaik. Pertumbuhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,16 persen dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,47 persen. Namun, pengeluaran konsumsi rumah tangga sedikit melambat di tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi (9,81 persen). Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya serta transportasi dan pergudangan yang masing-masing tumbuh sebesar 8,66 persen dan 8,49 persen. Jika dilihat strukturnya perekonomian Indonesia tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tahun 2017 surplus NPI mengalami penurunan dari 12,1 persen di tahun 2016 menjadi sebesar 11,6 miliar dolar AS pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh

meningkatnya defisit transaksi berjalan dari 16,95 miliar dolar AS pada tahun 2016 menjadi 17,29 miliar dolar AS pada tahun 2017. Meningkatnya defisit transaksi berjalan didorong oleh peningkatan defisit yang dialami oleh neraca perdagangan jasa dan defisit dari pendapatan primer, yaitu masing-masing menjadi defisit 7,8 Miliar dolar AS dan 32,8 miliar dolar AS. Pada sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial pada tahun 2017 tercatat surplus sebesar 29,2 miliar dolar AS. Surplus tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 29,3 miliar dolar AS. Kenaikan surplus pada investasi langsung dan investasi portofolio tidak dapat mengimbangi meningkatnya defisit yang dimiliki oleh investasi lainnya. Sementara itu, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2017 mencapai 130,2 miliar dolar AS atau setara dengan 8,3 bulan kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri (ULN) pemerintah.

Sejalan dengan kinerja NPI, secara umum nilai tukar rupiah cenderung mengalami depresiasi pada tahun 2017. Pelemahan rupiah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh eksternal maupun internal. Secara rata-rata, rupiah melemah dari Rp13.307 per dolar AS pada tahun 2016 menjadi Rp13.384 per dolar AS, Pelemahan ini terutama terkait dengan kondisi eksternal seperti membaiknya perekonomian Amerika Serikat yang berdampak pada arus keluar modal dari pasar keuangan Indonesia.

Pada tahun 2017 inflasi umum tercatat sebesar 3,61 persen. Besaran inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3,02 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi yaitu perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 5,14 persen kemudian transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,23 persen. Sementara, inflasi terendah dialami oleh bahan makanan yaitu hanya sebesar 1,26 persen.

Perkembangan suku bunga (sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi pasar uang) selama tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016. Suku bunga deposito dengan tenor 3 bulan pada tahun 2017 sebesar 6,52 persen atau turun 65 bps dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,17 persen. Penurunan suku bunga deposito juga diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan. Sepanjang tahun 2017 suku bunga modal kerja, investasi dan konsumsi mengalami penurunan berkisar 0,45-0,80 persen dibandingkan tahun 2016. Penurunan suku bunga kredit tersebut dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian domestik dan ekspektasi penurunan risiko kredit sepanjang tahun 2017 yang diindikasikan melalui penurunan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2017. Kredit bermasalah sepanjang tahun 2017 menurun menjadi 2,5 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 2,9 persen.

Kinerja industri perbankan menunjukkan mengalami peningkatan selama tahun 2017. Nilai kredit yang disalurkan sampai dengan tahun 2017 mencatat sebesar Rp 7.177 Triliun

atau meningkat sebesar 9,24 persen dibandingkan tahun 2016 senilai Rp 6.570 triliun. Namun, peningkatan ini lebih rendah dibandingkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2016 sebesar sebesar 10,38 persen. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 9,67 persen pada akhir tahun 2017, Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 9,98 persen.

Berdasarkan rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) kinerja perbankan terjaga baik. Hal tersebut tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2017 yang mencapai 23,18 persen jauh di atas cadangan minimum 8 persen. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 22,93 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 2,5 persen, masih cukup aman karena di bawah 5 persen. NPL tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 2,9 persen.

Kondisi pasar saham domestik relatif mengalami peningkatan selama tahun 2017. Pada akhir tahun 2017 IHSG tercatat pada level 6.355,7 meningkat 19,9 persen dari IHSG pada akhir tahun 2016 yang tercatat pada level 5.296,7. Peningkatan IHSG didorong oleh sentimen positif baik yang berasal dari membaiknya kondisi perekonomian global, meningkatnya perdagangan internasional dan membaiknya ekonomi domestik. Faktor yang berasal dari global utamanya didukung oleh membaiknya perekonomian di negara-negara maju utamanya Amerika Serikat sedangkan faktor yang berasal dari domestik seperti kuatnya kondisi makroekonomi Indonesia dan sentimen positif dari keberhasilan program amnesti pajak.

Sejalan dengan pasar saham, kinerja pasar obligasi selama tahun 2017 juga tercatat membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan rata-rata imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 12 bps. Penurunan *yield* ini terjadi di hampir semua tenor obligasi baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Di samping itu, pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan pembelian obligasi oleh *non residen*.

4.2 PERKEMBANGAN TABUNGAN BRUTO

**Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor,
Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	2,046.57	2,378.95	2,689.64	2,952.51	3,108.73
2. Korporasi Finansial	167.11	220.75	206.14	270.45	356.14
3. Pemerintah	-30.81	-79.34	-83.06	-148.79	-132.32
4. Rumah Tangga	735.22	796.51	877.41	938.23	959.94
5. LNPRT	12.01	14.99	16.23	17.09	21.09
6. Luar Negeri	299.48	325.29	234.55	225.11	231.50
JUMLAH	3,229.59	3,657.15	3,940.90	4,254.60	4,545.07

*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 ***) angka sangat sangat sementara

Perkembangan tabungan bruto menurut sektor selama tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 4.1. Selama kurun waktu 2013-2017, tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 8,53 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 13,24 persen. Tahun 2017 tabungan bruto mengalami peningkatan sebesar Rp 290,47 triliun atau meningkat 6,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara sektoral, sektor Korporasi Finansial mengalami peningkatan tabungan bruto yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya selama periode tersebut. Sedangkan sektor Pemerintah mengalami penurunan tabungan bruto.

**Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor,
Tahun 2013-2017 (Persen)**

SEKTOR	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	63.37	65.05	68.25	69.40	68.40
2. Korporasi Finansial	5.17	6.04	5.23	6.36	7.84
3. Pemerintah	-0.95	-2.17	-2.11	-3.50	-2.91
4. Rumah Tangga	22.77	21.78	22.26	22.05	21.12
5. LNPRT	0.37	0.41	0.41	0.40	0.46
6. Luar Negeri	9.27	8.89	5.95	5.29	5.09
JUMLAH	100	100	100	100	100

*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 ***) angka sangat sangat sementara

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa selama periode 2013-2017 sektor Korporasi Non Finansial memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan

tabungan bruto secara keseluruhan. Kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 67,17 persen. Kontribusi tertinggi dari sektor ini terhadap total tabungan bruto selama periode tersebut terjadi di tahun 2016 sebesar 69,40 persen dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2013 sebesar 63,37 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran yang dimainkan oleh sektor ini dalam kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional. Tabungan tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi baik investasi fisik maupun investasi finansial.

Sedangkan pada sektor Pemerintah, walaupun kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional tidak signifikan, namun perannya sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat sangat menentukan terhadap jalannya roda perekonomian nasional. Pada periode 2013-2017, kontribusi tabungan bruto sektor Pemerintah secara rata-rata hanya sebesar -2,33 persen/tahun. Kontribusi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor Rumah Tangga, Luar Negeri, Korporasi Finansial, dan LNPRT yang kontribusinya masing-masing sebesar 22 persen/tahun, 6,90 persen/tahun, 6,13 persen/tahun, dan 0,41 persen/tahun (terhadap pembentukan tabungan bruto nasional).

Tabel 4.3 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2013-2017 (persen)

SEKTOR	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	21.44	22.51	23.32	23.80	22.88
2. Korporasi Finansial	1.75	2.09	1.79	2.18	2.62
3. Pemerintah	-0.32	-0.75	-0.72	-1.20	-0.97
4. Rumah Tangga	7.70	7.54	7.61	7.56	7.06
5. LNPRT	0.13	0.14	0.14	0.14	0.16
6. Luar Negeri	3.14	3.08	2.03	1.81	1.70
JUMLAH	33.83	34.60	34.17	34.29	33.45
PDB (Triliun Rp)	9,546.13	10,569.71	11,531.72	12,406.81	13,588.80

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

****) angka sangat sangat sementara

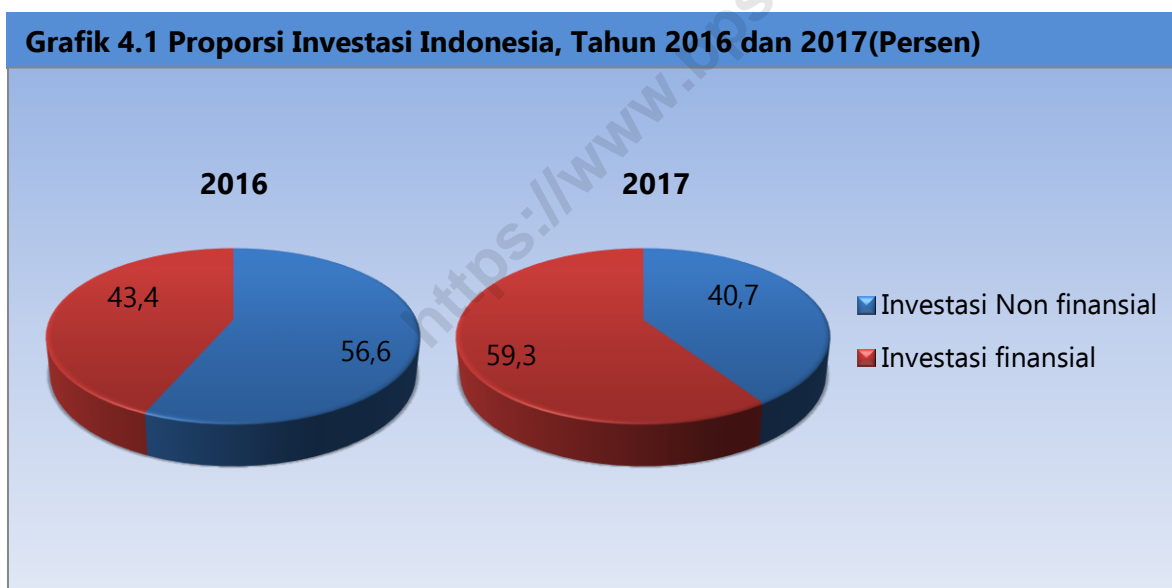
Tabel 4.3 memperlihatkan struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor, dimana secara umum persentase struktur ini cenderung bervariasi. Selama periode 2013-2017, struktur tabungan bruto terhadap PDB dari seluruh sektor berkisar antara 33,45 persen hingga 34,60 persen. Selama periode tersebut, nilai terbesar masih pada sektor Korporasi Non Finansial. Nilai terkecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,44 persen, sedangkan nilai terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,80 persen. Pada sektor Korporasi Finansial, nilainya berkisar antara 1,75 persen (tahun

2013) hingga 2,62 persen (tahun 2017). Sektor Pemerintah berada pada kisaran -1,20 persen (tahun 2016) hingga -0,32 persen (tahun 2013). Pada sektor Rumah Tangga, persentase strukturnya berkisar antara 7,06 persen (tahun 2017) hingga 7,70 persen (tahun 2013). Sektor Luar Negeri berada pada kisaran 1,70 persen (tahun 2017) hingga 3,14 persen (tahun 2013). Untuk sektor LNPRT menunjukkan angka yang relatif stabil, yaitu sekitar 0,14 persen.

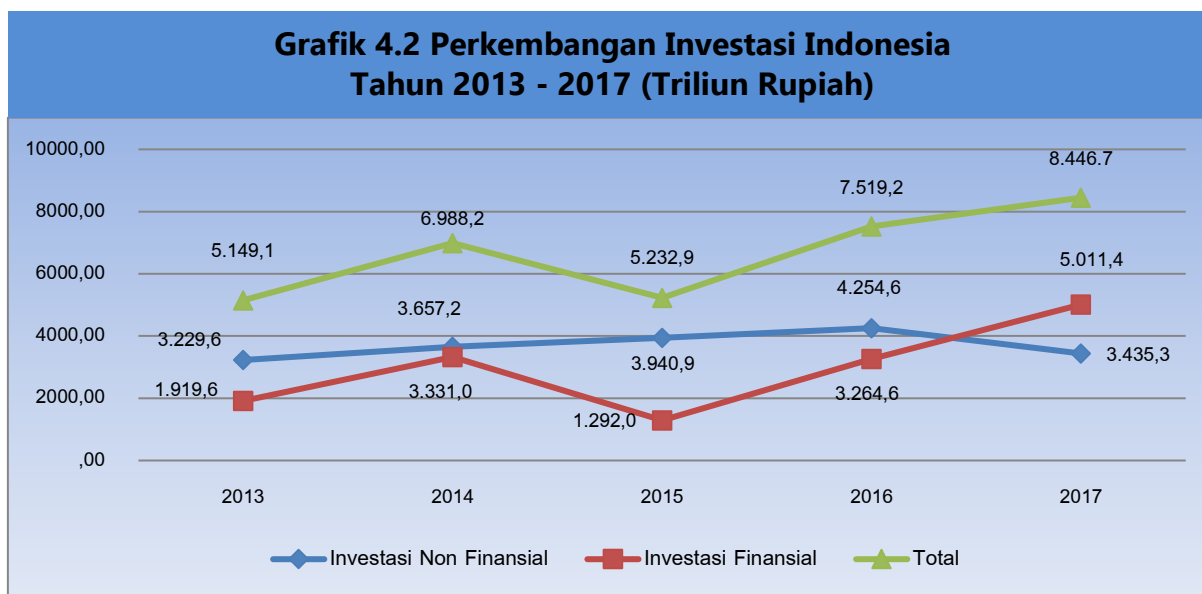
4.3 PERKEMBANGAN INVESTASI

4.3.1. Gambaran Umum Investasi Indonesia 2013-2017

Perkembangan investasi dalam konteks ini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial terjadi akibat adanya proses perubahan (penambahan maupun pengurangan) aset non finansial berupa barang modal dan persediaan (inventori). Sedangkan investasi finansial terjadi karena adanya transaksi finansial oleh para pelaku ekonomi di pasar keuangan melalui berbagai macam instrumen finansial, seperti saham, obligasi, SBI, pinjaman, valas, dan sebagainya.



Pada tahun 2016, peran investasi non finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasi finansial, tetapi pada tahun 2017 terjadi perubahan struktur, investasi finansial lebih dominan. Membaiknya kondisi keuangan global yang didukung oleh membaiknya perekonomian dan perdagangan global turut mengairahkan pasar keuangan domestik. Pada tahun 2016, selisih antara investasi non finansial (56,6 persen) dengan investasi finansial (43,4 persen) mulai sempit, sedangkan pada tahun 2017, kontribusi investasi non finansial menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 40,7 persen. Penurunan diakibatkan adanya pergeseran investasi dari investasi fisik/non finansial ke investasi finansial.



Berdasarkan grafik 4.2, terlihat bahwa selama periode 2013-2017, nilai total investasi Indonesia menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Pola ini sejalan dengan nilai investasi finansial yang juga berfluktuatif. Pertumbuhan total investasi mengalami kontraksi pada tahun 2013 dan 2015 dengan kontraksi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 25,11 persen. Namun sebaliknya, nilai investasi non finansial menunjukkan tren yang terus meningkat kecuali di tahun 2017.

4.3.2. Perkembangan Investasi Non Finansial Indonesia Tahun 2013 - 2017

Dalam teori ekonomi makro dijelaskan bahwa tabungan bruto dan investasi non finansial apabila dilihat secara total, akan bernilai sama. Tetapi jika dilihat secara sektoral maka antara tabungan bruto dan investasi non finansial dapat memiliki nilai yang berbeda. Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional sama dengan pola perkembangan tabungan bruto.

Tabel 4.4 Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	2.479,26	2.823,47	2.991,26	3.310,12	3.556,07
2. Korporasi Finansial	60,83	81,03	81,13	96,83	141,38
3. Pemerintah	180,86	147,35	215,43	167,22	208,66
4. Rumah Tangga	502,23	599,80	645,86	672,28	630,00
5. LNPRT	6,40	5,51	7,22	8,15	8,97
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.229,59	3.657,15	3.940,90	4.254,60	4.545,07

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

****) angka sangat sangat sementara

Definisi dari investasi non finansial (INF) disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Tabel 4.4. menyajikan perkembangan INF yang dilakukan masing-masing sektor beserta nilainya selama tahun 2013-2017. Sedangkan Tabel 4.5 menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor dalam menciptakan INF selama tahun 2013-2017. Secara sektoral, sektor Korporasi Non Finansial mengambil peran yang sangat dominan dalam melakukan INF. Hal ini terlihat jelas dari besarnya nilai investasi ini yang mencapai Rp 3.556,07 triliun pada tahun 2017. Jumlah tersebut merupakan 78,24 persen dari nilai INF yang dilakukan oleh seluruh sektor. Besarnya nilai INF yang dikeluarkan oleh sektor ini merupakan salah satu ciri khas dari sektor ini, dimana untuk menjamin kegiatan ekonominya dapat berjalan dengan baik, biasanya diperlukan investasi yang cukup besar dalam bentuk investasi non finansial (berupa barang modal dan stok). Selain sektor Korporasi Non Finansial, sektor yang juga berperan cukup dominan dalam pembentukan INF adalah Rumah Tangga yang kemudian diikuti oleh Pemerintah diposisi ketiga. Selama tahun 2013-2017, nilai INF sektor Rumah Tangga berkisar antara Rp 502,23 triliun hingga Rp 672,28 triliun. Sedangkan nilai INF sektor Pemerintah berkisar antara Rp 147,35 triliun hingga Rp 215,43 triliun.

Tabel 4.5 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor					
Tahun 2013-2017 (persen)					
SEKTOR	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	76,77	77,20	75,90	77,80	78,24
2. Korporasi Finansial	1,88	2,22	2,06	2,28	3,11
3. Pemerintah	5,60	4,03	5,47	3,93	4,59
4. Rumah Tangga	15,55	16,40	16,39	15,80	13,86
5. LNPRT	0,20	0,15	0,18	0,19	0,20
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	100	100	100	100	100

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

***) angka sangat sangat sementara

Dari tabel 4.5. diatas jelas terlihat bahwa hampir sebagian besar INF dilakukan oleh sektor Korporasi Non Finansial. Selama tahun 2013-2017, secara rata-rata sektor ini mengambil porsi sebesar 77,18 persen dari total INF seluruh sektor. Nilai INF yang dikeluarkannya pun cukup besar, dimana pada tahun 2017 mencapai Rp 3.556,07 triliun. Berdasarkan Tabel 4.5 juga, terlihat bahwa selama periode 2013-2017, kontribusi sektor Korporasi Non Finansial terhadap INF secara umum berkisar pada angka 77 persen. Kontribusi tertinggi dari sektor ini selama periode tersebut terjadi di tahun 2017 sebesar 78,24 persen dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 75,90 persen.

Sektor yang juga mempunyai kontribusi nyata terhadap pembentukan INF adalah sektor Rumah Tangga dan Pemerintah. Selama tahun 2013-2017 rata-rata kontribusi sektor-sektor ini sebesar 15,60 persen dan 4,72 persen. Kontribusi INF sektor Rumah Tangga meningkat dari tahun 2013 sampai 2014 dan menurun sampai tahun 2017. Pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 15,55 persen naik menjadi 16,40 persen pada 2014. Namun pada tahun 2015 kontribusi tersebut menurun menjadi 16,39 persen dan terus turun hingga di tahun 2017 menjadi 13,86 persen. Sektor Pemerintah secara umum berkisar pada besaran 3-5 persen.

Kontribusi sektor Korporasi Finansial dan LNPRT terhadap keseluruhan investasi non finansial tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2013-2017, rata-rata kontribusi masing-masing sektor adalah 2,31 persen dan 0,18 persen saja.

Tabel 4.6 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2013-2017 (persen)

SEKTOR	2013	2014	2015*	2016**	2017***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	25,97	26,71	25,94	26,68	26,17
2. Korporasi Finansial	0,64	0,77	0,70	0,78	1,04
3. Pemerintah	1,89	1,39	1,87	1,35	1,54
4. Rumah Tangga	5,26	5,67	5,60	5,42	4,64
5. LNPRT	0,07	0,05	0,06	0,07	0,07
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	33,83	34,60	34,17	34,29	33,45
PDB (Triliun Rp)	9.546,13	10.569,71	11.531,72	12.406,81	13.588,80
*) angka sementara					
**) angka sangat sementara					
***) angka sangat sangat sementara					

Tabel 4.6 memperlihatkan persentase struktur investasi non finansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Selama periode 2013-2017, secara umum persentase struktur investasi non finansial terhadap PDB dari semua sektor bervariasi. Persentase terbesar dari struktur ini masih pada sektor Korporasi Non Finansial. Rata-rata kontribusi dari semua sektor masing-masing sebesar 26,29 (sektor Korporasi Non Finansial), 0,79 (sektor Korporasi Finansial), 1,61 (sektor Pemerintah), 5,32 (sektor Rumah Tangga), dan 0,06 (sektor LNPRT).

4.3.3. Perkembangan Investasi Finansial Indonesia Tahun 2017

Tabel 4.7 menggambarkan komposisi jenis-jenis investasi finansial berdasarkan instrumen finansial. Selama tahun 2017 investasi finansial mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.

Tabel 4.7 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2017 (Triliun Rupiah)		
Instrumen Finansial	Penambahan/ Pengurangan	%
(1)	(2)	(3)
F1. Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	0,00	0,00
F2. Uang dan Simpanan	771,96	15,40
F3. Surat Berharga	596,82	11,91
F4. Pinjaman	577,18	11,52
F5. Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	2.443,51	48,76
F6. Asuransi, Dana Pensiun, dan Jaminan Terstandar	113,98	2,27
F7. Financial Derivatives	-13,51	-0,27
F8. Hutang/Piutang Lainnya	521,50	10,41
Jumlah	5.011,44	100,00

Investasi finansial yang tercipta pada tahun 2017 sebesar Rp 5.011,44 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 55,96 persen dibandingkan tahun 2016. Peningkatan terjadi pada semua instrumen finansial kecuali *financial derivative*. Selama tahun 2017, ekuitas dan unit penyertaan investasi kolektif menjadi instrumen yang paling menarik untuk berinvestasi, dimana kontribusinya terhadap investasi finansial adalah paling besar yaitu 48,76 persen atau senilai Rp 2.443,51 triliun. Selanjutnya diikuti uang dan simpanan kemudian surat berharga yang masing-masing sebesar Rp 771,96 triliun dan Rp 596,82 triliun.

Tabel 4.8 Komposisi Perubahan Kepemilikan Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif Menurut Sektor, Tahun 2017 (Triliun Rupiah)	
Sektor	Penambahan/ Pengurangan
(1)	(2)
1. Korporasi Non Finansial	1.207,74
2. Korporasi Finansial	453,68
3. Pemerintah	4,41
4. Rumah Tangga	529,22
5. LNPRT	7,63
6. Luar Negeri	240,84
Jumlah	2.443,51

Tabel 4.8 menggambarkan perubahan kepemilikan ekuitas dan unit penyertaan investasi kolektif masing-masing sektor selama tahun 2017. Sektor Korporasi Non Finansial merupakan sektor yang paling dominan dalam menempatkan dananya di instrumen ini (*net buying*) yaitu sebesar Rp 1.207,74 triliun. Diikuti sektor Rumah Tangga, Korporasi Finansial, Luar Negeri, dan LNPRT yang menempatkan dananya masing-masing sebesar Rp 529,22 triliun, Rp 453,68 triliun, Rp 240,84 triliun, dan Rp 7,63 triliun. Sedangkan sektor lain yang

melakukan *net buying* terendah pada instrumen ini adalah Pemerintah yaitu sebesar Rp 4,41 triliun.

Berkaitan dengan kepemilikan investasi, menarik untuk disimak bagaimana pola kegiatan investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik. Tabel 4.9 memperlihatkan perubahan kepemilikan beberapa jenis investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik.

Tabel 4.9 Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2017 (Triliun Rupiah)			
Jenis Investasi	INVESTASI LN	TOTAL INVESTASI	% TERHADAP TOTAL INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
F1. Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	-5,89	0,00	
F2. Uang dan Simpanan	2,54	771,96	0,33
F3. Surat Berharga	354,92	596,82	59,47
F4. Pinjaman	27,39	577,18	4,75
F5. Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	240,84	2.443,51	9,86
F6. Asuransi, Dana Pensiun, dan Jaminan Terstandar	0,00	113,98	0,00
F7. Financial Derivatives	-7,62	-13,51	56,36
F8. Hutang/Piutang Lainnya	24,96	521,50	4,79

Pada tabel tersebut terlihat bahwa investor asing selama tahun 2017 telah menguasai beberapa instrumen finansial, di antaranya dalam surat berharga. Penambahan kepemilikan dari investor asing terhadap total penambahannya mencapai 59,47 persen. Ini menunjukkan bahwa pasar keuangan dan produk keuangan domestik cukup menarik bagi investor asing yang ingin menanamkan investasinya di pasar keuangan domestik.

4.4 PERKEMBANGAN CELAH TABUNGAN DAN INVESTASI (*S-I Gap*) TAHUN 2013-2017

Tabel 4.10 menggambarkan nilai celah tabungan dan investasi (*S-I Gap*) menurut sektor selama tahun 2013-2017. *S-I Gap* (*Saving Investment Gap*) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Korporasi Non Finansial, jika *S-I Gap* sektor ini negatif berarti sektor Korporasi Non Finansial memperoleh pinjaman dari sektor lainnya terutama sektor Rumah Tangga. Dalam hal ini sektor Rumah Tangga mengalami *net lending*, begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.10 S-I Gap Menurut Sektor
Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR (1)	2013 (3)	2014 (4)	2015*) (5)	2016**) (6)	2017***) (7)
1. Korporasi Non Finansial	-432.69	-444.51	-301.62	-357.61	-447.33
2. Korporasi Finansial	106.28	139.72	125.01	173.62	214.75
3. Pemerintah	-211.67	-226.69	-298.50	-316.01	-340.98
4. Rumah Tangga	232.99	196.71	231.55	265.96	329.94
5. LNPRT	5.61	9.49	9.01	8.94	12.12
6. Luar Negeri	299.48	325.29	234.55	225.11	231.50
JUMLAH	-	-	-	-	-

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

****) angka sangat sangat sementara

Selama tahun 2013-2017, sektor Korporasi Non Finansial senantiasa mengalami *net borrowing*. Kekurangan dana tersebut dapat disediakan, terutama oleh sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri. Jika sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka akan dipenuhi dari sektor Korporasi Finansial dan LNPRT. Dalam hal ini sektor Rumah Tangga, sektor Luar Negeri, sektor Korporasi Finansial dan sektor LNPRT mengalami *net lending*.

Berbeda dengan sektor Korporasi Non Finansial dan Pemerintah yang merupakan sektor defisit, sektor Rumah Tangga, Luar Negeri, Korporasi Finansial, dan LNPRT adalah sektor surplus. Sektor-sektor ini memiliki kemampuan untuk memberi pinjaman kepada sektor lain yang kekurangan dana. Selama tahun 2013-2017 rata-rata surplus sektor Rumah Tangga dan sektor Luar Negeri secara berturut-turut mencapai Rp 251,43 triliun pertahun dan Rp 263,18 triliun pertahun. Sedangkan rata-rata defisit pada sektor Korporasi Non Finansial adalah sebesar Rp 396,75 triliun pertahun. Sehingga selama periode tersebut masih diperlukan tambahan dana terutama dari sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri untuk menutupi kekurangan dana pada sektor Korporasi Non Finansial.

4.5 PERCEPATAN UANG BEREDAR (*VELOCITY OF MONEY*) DAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL DEEPENING*)

4.6.1. Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*)

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Peredaran uang disebabkan adanya transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perekonomian. Jika *V* rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika *V* tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat

tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi.

Sebagai contoh sederhana, pada suatu periode, A menjual barang dagangannya ke B sebesar Rp50 ribu, maka V yang terjadi adalah 1. Selanjutnya jika A menggunakan uang Rp50 ribu tersebut untuk membayar jasa perbaikan barang misalnya, maka terjadi perpindahan uang (V) satu kali lagi. Walaupun secara nominal uangnya masih yang sama yaitu Rp50 ribu namun secara agregat jumlah uang yang beredar adalah Rp100 ribu r, sehingga perpindahan uang yang terjadi ada sebanyak 2 kali atau:

$$V = \frac{100}{50} = 2$$

Velocity of money dapat juga dipakai sebagai ukuran dalam menentukan inflasi. Disamping itu fluktuasi yang terjadi dalam *velocity of money* biasanya selalu diikuti dengan fluktuasi pada suku bunga (*interest rate*).

Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan rumus:

$$V = \frac{PDB}{M_1}$$

Di mana : V = *Velocity of Money*
 PDB = Produk Domestik Bruto
 M_1 = Uang beredar sempit

4.6.2. Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*)

Pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik ekses likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu:

- (i) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan.
- (ii) Dari sisi investor, pasar keuangan yang dalam memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya.
- (iii) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid. Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB (King dan Levine, 1993).

4.6.3. Uraian Ringkas *Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia Tahun 2013-2017

Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan *velocity of money* (V) dan *financial deepening* (FD) selama periode 2013-2017. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai agregat moneter lainnya, yaitu perkembangan uang beredar.

**Tabel 4.11 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto
Tahun 2013-2017**

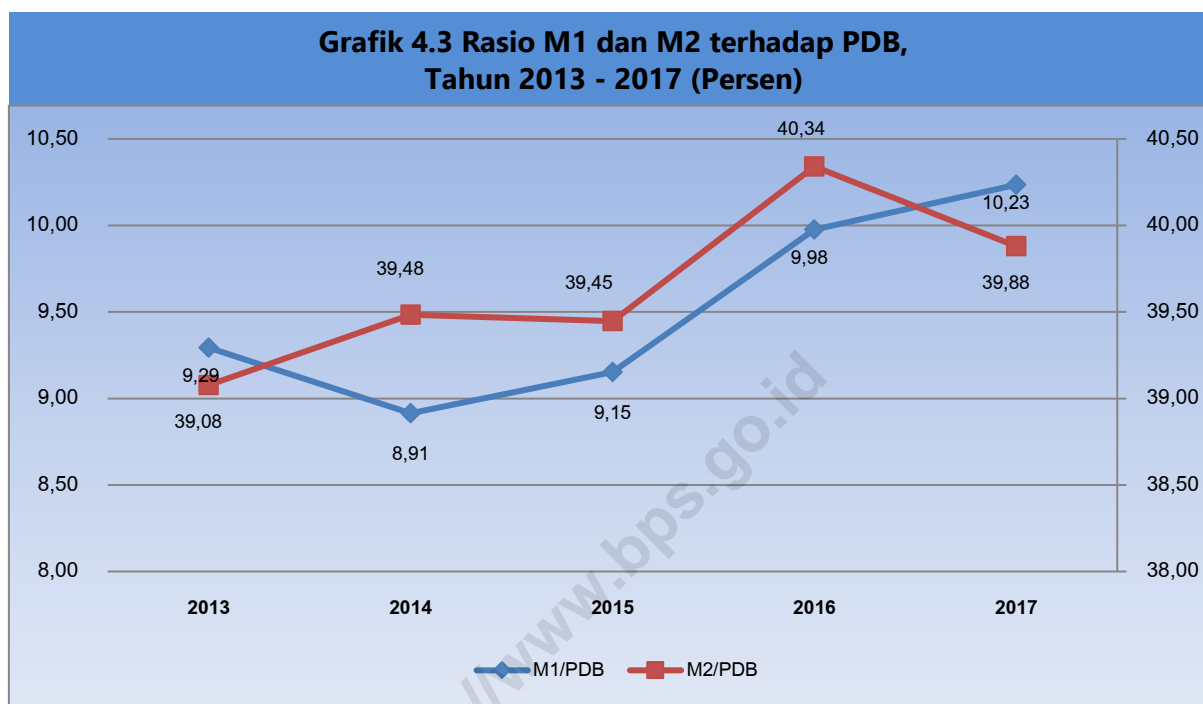
Tahun	Uang Beredar (Triliun Rp) ¹			M2	PDB ² (Triliun Rp)	Velocity PDB/M1	Rasio (%)	
	M1	Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham				M1/PDB	M2/PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2013	887,08	2.820,52	22,81	3.730,41	9.546,13	10,76	9,29	39,08
2014	942,22	3.209,48	21,63	4.173,33	10.569,71	11,22	8,91	39,48
2015	1.055,44	3.479,96	13,40	4.548,80	11.526,33	10,93	9,15	39,46
2016	1.237,64	3.753,81	13,53	5.004,98	12.406,77	10,02	9,98	40,34
2017	1.390,81	4.010,00	18,36	5.419,17	13.588,80	9,77	10,23	39,88

Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia

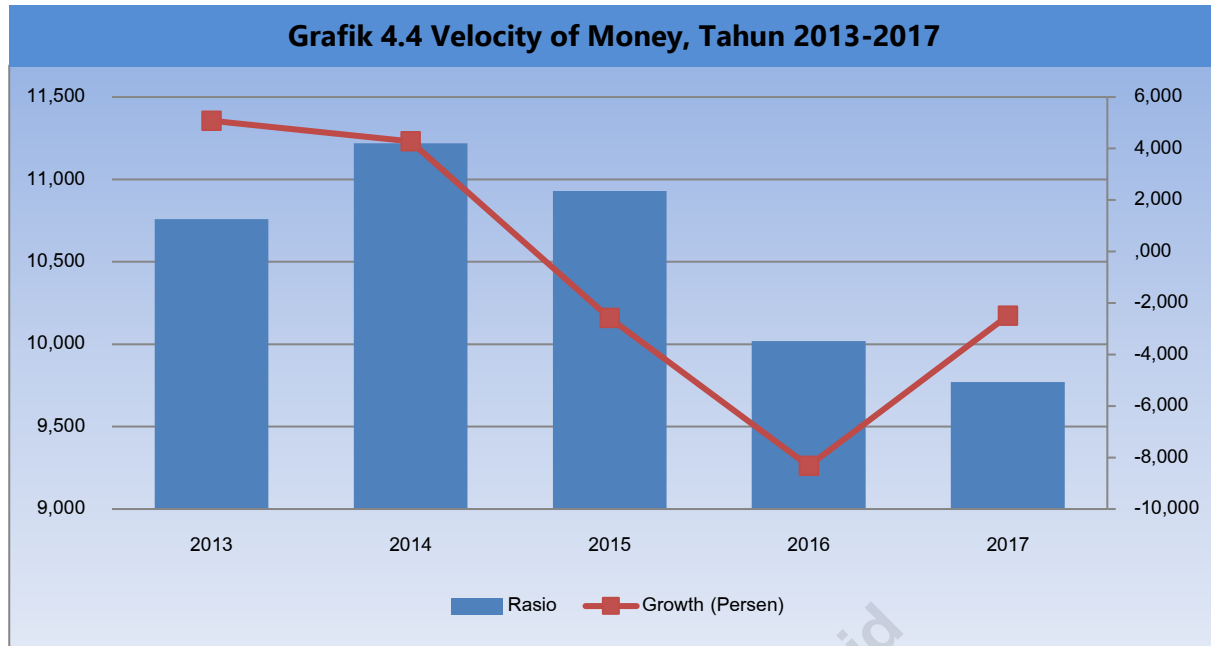
2) Pendapatan Nasional Indonesia

Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 4.11. Posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi uang kuasi. Selama periode 2013-2017 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,60 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 23,99 persen, dan sisanya sebesar 0,41 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan uang kuasi lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan M1. Selama periode 2013-2017, uang kuasi tumbuh sebesar 13,79 persen di tahun 2013 dan

terus turun menjadi 6,82 persen di tahun 2017, sebaliknya pertumbuhan M1 meningkat dari sebesar 6,21 persen menjadi 17,26 di tahun 2016 namun turun kembali di tahun 2017 menjadi 12,38. Hal ini mencerminkan bahwa uang kuasi walaupun masih lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang M1 namun proporsinya mulai menurun sejak 2014 hingga 2017.



Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*). Kondisi pendalaman pasar uang Indonesia selama periode 2013–2017 dapat dilihat dari Grafik 4.4. Untuk kasus Indonesia, upaya pendalaman sektor keuangan sedang dilakukan karena sektor keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Pada akhir tahun 2013 rasio M2/PDB Indonesia mencapai sebesar 39,08 namun nilainya semakin meningkat menjadi sebesar 40,34 persen di tahun 2016 dan kemudian di tahun 2017 turun menjadi 39,88 . Hal ini, seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah untuk terus mendorong masyarakat agar memanfaatkan dananya untuk keperluan kegiatan ekonomi yang lebih produktif.



Disamping *financial deepening*, masalah percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*) juga merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk melihat gambaran tentang stabilitas keuangan moneter. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2013-2017 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 9 sampai 11,5. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2013-2017 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut yang tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

Lampiran 1
Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

1. Sektor Korporasi Non-Finansial

Korporasi non-finansial adalah korporasi yang aktivitas utamanya memproduksi barang atau jasa non-finansial. Seluruh korporasi non-finansial residen termasuk dalam sektor korporasi non-finansial, dan di dalam praktek mencakup sebagian besar korporasi. Selain itu, mencakup lembaga non-profit (LNP) yang terlibat produksi pasar non-finansial seperti rumah sakit, sekolah, atau perguruan tinggi yang memungkinkan mereka menutup biaya produksi, atau asosiasi bisnis yang dibiayai korporasi non-finansial, atau *un-incorporated enterprises* yang berperan mempromosikan dan melayani kepentingan enterprise. Cakupan dari korporasi Non-finansial diantaranya:

1.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Dasar Pementukan BUMN. Sedangkan tatacara pembinaan dan pengawasan BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PESERO), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk).

Pertamina dan BULOG termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Negara BUMN. Badan hukum Pertamina dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971, sedangkan BULOG dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969. Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank.

1.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang

pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

1.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Perusahaan Swasta Non Finansial.

1.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (non-KUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

1.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Non rural Cooperative*)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

1.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

1.3.2 Perusahaan Swasta Non finansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2. Sektor Korporasi Finansial

Sektor Korporasi Finansial mencakup seluruh korporasi residen yang aktivitas utamanya menyediakan jasa keuangan, termasuk jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun, serta unit yang memfasilitasi perantara keuangan. Selain itu, sektor (termasuk LNP) lain yang terlibat dalam produksi pasar keuangan, seperti yang dibiayai oleh pelanggan enterprise finansial yang berperan mempromosi dan melayani kepentingan enterprise.

2.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

2.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

2.2.1 Bank Umum Konvensional (*Deposit Money Banks*)

Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Bank Umum Konvensional terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

2.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

2.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi,

Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

2.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) dan Kartu Kredit (*Credit Card*). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*non depositories institution*) sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

2.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (lessor) kepada para penyewa guna usaha (*lease*) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "*finance lease*" maupun "*operating lease*" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

2.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

2.3.1.3 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

2.3.1.4 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang

diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai *issuer*, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

2.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

2.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Peransuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

2.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Umum, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

2.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*General Insurance Business*)

Usaha Asuransi Umum adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

2.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha Reasuaransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

2.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Kosultansi Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

2.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

2.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES
- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

Mulai tahun 2013 perusahaan asuransi kerugian melebur menjadi satu menjadi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan masuk ke dalam sektor pemerintah.

2.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

2.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

2.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

2.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

2.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau *Initial Public Offering* (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, *Underwriter*, *Adjuster* dan Penjamin Emisi.

3. Pemerintah (*Government*)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

3.1. Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat

peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

3.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

4. Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

LNPRT terdiri dari seluruh LNP residen (kecuali yang dikendalikan oleh pemerintah) yang menyediakan barang atau jasa non-pasar untuk rumah tangga atau masyarakat luas.

5. Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah Tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

6. Luar Negeri (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*).

Lampiran 2
Definisi Kategori Transaksi
Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia

<https://www.scribd.com/document/111111111>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

B8g Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto. Penyusutan Barang Modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan. Sedangkan Tabungan Neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan disini meliputi: pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

P5g Investasi Non finansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori. Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin dan peralatan. Sedangkan Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Ini termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian.

B9c Pinjaman Neto = B8g – P5g

Pinjaman Neto atau yang lebih sering dikenal dengan *Net Lending/Net Borrowing* merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Non Finansial atau Investasi Non Finansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau

Saving Investment Gap (S-I Gap).

Selisih Statistik = B9c – B9f

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya Selisih Statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

B9f Perubahan Neto Investasi Finansial = A-L

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (perolehan neto aset finansial) dengan jumlah sumber finansial (perolehan neto kewajiban finansial).

Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial (perolehan neto aset finansial) merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikkan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial (perolehan neto kewajiban finansial) merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan dari sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

F1 Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)

Emas moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs) yang diterbitkan *Internasional Monetary Fund* (IMF) merupakan aset yang umumnya dimiliki hanya oleh otoritas moneter.

F11 Emas moneter

Emas moneter merupakan emas dengan mana otoritas moneter (atau pihak lain yang tunduk pada kontrol efektif dari otoritas moneter) mempunyai hak dan dipegang sebagai aset cadangan. Emas moneter terdiri dari emas batangan (termasuk emas yang dipegang dalam neraca alokasi emas) dan neraca emas tidak dialokasi pada non-residen yang memberi hak untuk mengklaim pengiriman

emas.

F12 Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus (SDRs) merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasi pada anggotanya untuk melengkapi cadangan aset yang ada. *Department of Special Drawing Rights* IMF mengelola cadangan aset dengan mengalokasi SDRs di antara negara anggota IMF dan badan internasional (secara kolektif dikenal sebagai peserta).

F2 Uang dan Simpanan

Transaksi finansial dalam uang dan simpanan terdiri atas penambahan atau pelepasan uang tunai, serta peningkatan atau penambahan simpanan atau penarikannya.

F21 Uang

Uang terdiri dari uang kertas dan koin dengan nilai nominal yang tetap dan diterbitkan atau di bawah otoritas bank sentral atau pemerintah (koin *commemorative* yang tidak beredar harus dikeluarkan, sebagaimana yang belum diterbitkan, atau uang tunai *demonetized*). Suatu perbedaan harus tergambar antara mata uang domestik (yaitu mata uang yang menjadi kewajiban unit residen, seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah pusat) dan mata uang asing yang merupakan kewajiban unit non-residen (seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah dari negara lain).

F22 Transferable Deposits

Transferable Deposits (simpanan yang mudah dicairkan) terdiri dari seluruh simpanan yang:

- a. Dapat ditukarkan dengan uang kertas dan uang logam atas permintaan pada nilai nominal dan tanpa penalty atau pembatasan; dan
- b. Dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, wesel, giro order, debit/kredit langsung, atau fasilitas pembayaran langsung lainnya.

F29 Simpanan lainnya

Simpanan lainnya terdiri dari seluruh klaim, selain simpanan transferable yang dinyatakan oleh bukti simpanan. Bentuk simpanan tertentu yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tabungan (yang selalu tidak dapat ditransfer), deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang tidak dapat dinegoisasi. Kategori ini juga mencakup saham atau bukti simpanan semacam itu yang diterbitkan asosiasi tabungan dan pinjaman, pembangunan masyarakat, serikat kredit dsj. Simpanan

dengan kemampuan transfer terbatas, yang dikecualikan dari kategori simpanan yang transferable disertakan di sini. Klaim terhadap IMF yang merupakan komponen cadangan devisa dan tidak dibuktikan melalui pinjaman, dicatat dalam bentuk simpanan lain. (Klaim pada IMF yang dibuktikan melalui pinjaman, harus masuk dalam pinjaman). Pembayaran marjin yang dibayar tunai terkait kontrak finansial derivatif (dijelaskan di bawah), termasuk dalam simpanan lain, seperti halnya *overnight* dan perjanjian membeli kembali jangka sangat pendek jika dianggap bagian dari definisi uang nasional yang diperluas. Perjanjian membeli kembali lainnya diklasifikasi sebagai pinjaman.

F3 Surat Hutang

Surat hutang atau sekuritas hutang merupakan *negotiable instruments* yang memberikan suatu bukti hutang. Surat hutang mencakup tagihan, obligasi, sertifikat simpanan yang *negotiable*, *commercial paper*, *debentures*, sekuritas aset *backed*, dan instrumen sejenis yang umum diperdagangkan di pasar finansial.

F31 Surat Hutang Jangka Pendek

Surat hutang atau sekuritas hutang jangka pendek, mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* satu tahun atau kurang. Sekuritas dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan jika dikeluarkan di bawah fasilitas jangka panjang, seperti dalam menerbitkan fasilitas *note*.

F32 Surat Hutang Jangka Panjang

Surat hutang atau sekuritas hutang jangka panjang mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* lebih dari satu tahun. Klaim dengan tanggal jatuh tempo *optional* terakhirnya lebih dari satu tahun dan klaim dengan tanggal jatuh tempo tidak terbatas, diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

F4 Pinjaman

Pinjaman merupakan aset finansial yang:

- a. Dibuat saat kreditur meminjamkan dana secara langsung pada debitur, dan
- b. Dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat diperdagangkan (*negotiable*).

F41 Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek terdiri dari pinjaman yang mempunyai original jatuh tempo satu tahun atau kurang. Pinjaman yang dibayar kembali atas permintaan kreditur diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan ketika pinjaman itu diharapkan berumur lebih dari setahun.

F42 Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman yang mempunyai masa jatuh tempo lebih setahun.

F5 Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif

Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif memiliki fitur berbeda, yaitu pemegangnya memiliki sisa klaim atas aset dari unit institusi yang menerbitkan instrumen. Ekuitas mewakili pemilik dana dalam unit institusi. Berbeda dengan hutang, ekuitas umumnya tidak memberi hak pada pemiliknya sejumlah yang ditentukan atau yang ditentukan menurut suatu rumusan yang tetap. Unit Penyertaan Investasi Kolektif memiliki peran khusus di dalam aktivitas perantara finansial sebagai jenis investasi kolektif atas aset lain, sehingga diidentifikasi secara terpisah.

F51 Ekuitas

Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan pengakuan klaim pada nilai sisa dari suatu korporasi atau kuasi-korporasi setelah klaim dari seluruh kreditur dipenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai tanggungan dari unit institusi yang menerbitkan.

Ekuitas terdiri dari saham terdaftar, saham tidak terdaftar, dan jenis ekuitas lainnya. Saham terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tercatat di dalam bursa saham. Saham tidak terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tidak terdaftar dalam bursa saham. Sedangkan ekuitas lainnya merupakan ekuitas yang tidak berbentuk sekuritas.

F52 Unit Penyertaan Investasi Kolektif

Unit Penyertaan Investasi Kolektif merupakan investasi kolektif yang berlangsung jika para investor mengumpulkan dana untuk investasi aset finansial atau aset non-finansial.

Unit Penyertaan Investasi Kolektif dapat berbentuk *Money Market Funds* (MMF) atau *Non Money Market Funds* (non-MMF). MMF merupakan dana investasi yang diinvestasi hanya atau utamanya dalam pasar uang sekuritas jangka pendek seperti *treasury bills*, *certificates of deposit*, dan *commercial paper*. MMF terkadang secara fungsional mirip dengan simpanan *transferable*, seperti akun dengan hak menulis cek yang terbatas. Jika dana saham tersebut termasuk uang beredar dalam pelaporan ekonomi, mereka dicatat sebagai bagian yang terpisah *to allow* rekonsiliasi dengan statistik moneter. Saham atau unit MMF merepresentasi suatu klaim yang proporsional atas nilai MMF yang dibentuk. Sedangkan Non-

MMF menggambarkan klaim atas suatu proporsi nilai dana investasi yang dibangun selain dari dana pasar uang.

F6 Asuransi, Dana Pensiun, dan Jaminan Terstandar

Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar berfungsi sebagai bentuk redistribusi pendapatan atau kekayaan yang dimediasi oleh institusi finansial. Redistribusi terjadi antar unit individu institusi pada periode sama, atau antar unit institusi yang sama pada periode yang berbeda, atau kombinasi keduanya.

F61 Cadangan Teknis Asuransi Non-Jiwa

Cadangan teknis asuransi non-jiwa terdiri dari pembayaran di muka atas premi asuransi non-jiwa dan cadangan neto guna memenuhi klaim asuransi non-jiwa yang mungkin terjadi.

F62 Hak Anuitas dan Asuransi Jiwa

Hak Anuitas dan Asuransi Jiwa memperlihatkan perluasan klaim finansial milik pemegang polis yang ditawarkan oleh suatu *enterprise* asuransi jiwa atau yang menyediakan jaminan hari tua. Hanya transaksi untuk asuransi jiwa dan jaminan hari tua yang dicatat pada neraca finansial, yakni selisih antara premi bersih yang diterima dan klaim yang dibayar.

F63 Hak Pensiunan

Hak Pensiunan menunjukkan perluasan klaim finansial yang dipegang pensiunan di masa kini dan di masa mendatang terhadap majikan atau terhadap suatu pendanaan yang ditunjuk majikan untuk membayar pendapatan pensiun sebagai bagian dari perjanjian kompensasi antara majikan dan pekerja. Transaksi Hak Pensiunan yang dicatat pada neraca finansial adalah selisih bersih antara kontribusi yang diterima dan manfaat yang dibayarkan.

F7 Transaksi *Derivatives*

Transaksi *Derivatives* terdiri dari Finansial *Derivatives* dan Opsi saham pekerja. Finansial *Derivatives* merupakan instrumen finansial yang terkait dengan instrumen finansial tertentu atau indikator atau komoditas, melalui mana risiko finansial tertentu diperdagangkan di pasar finansial atas namanya sendiri.

Finansial *Derivatives* dapat berupa Opsi maupun Forward. Opsi merupakan kontrak yang memberikan pada pembeli hak opsi, namun bukan suatu obligasi untuk membeli (suatu pilihan "*call*") atau menjual (suatu pilihan "*put*") instrumen finansial tertentu atau komoditas pada harga yang ditentukan sebelumnya (harga "*strike*") dalam rentang waktu tertentu (opsi Amerika) atau pada tanggal tertentu

(opsi Eropa). Opsi, dijual atau "*written*" dalam banyak jenis basis *underlying* seperti ekuitas, suku bunga, mata uang asing, komoditas, dan indeks tertentu. Sedangkan suatu kontrak *forward* merupakan kontrak finansial tanpa syarat yang merupakan kewajiban untuk diselesaikan pada tanggal yang ditentukan. Kontrak *forward* dan kontrak *forward* lain biasanya, namun tidak selalu diselesaikan melalui pembayaran tunai atau penyediaan instrumen finansial lainnya daripada pengiriman aktual dari item yang mendasari, dan oleh karenanya dinilai dan diperdagangkan secara terpisah dari item yang mendasari.

Opsi saham pekerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal tertentu (the "*grant*" date) di bawah mana seorang pekerja dapat membeli sejumlah saham majikan pada harga lain (the "*strike*" price) baik pada saat tertentu (the "*vesting*" date) atau di dalam periode (the *exercise period*) segera setelah tanggal pemberian hak opsi.

F8 Hutang/Piutang Lainnya

F81 Kredit Dagang dan Pembayaran Dimuka

Kategori ini terdiri dari kredit dagang barang dan jasa yang diberikan pada korporasi, pemerintah, LNPRT, rumahtangga dan luar negeri, serta uang muka untuk pekerjaan yang sedang berlangsung (jika diklasifikasi sebagai inventori) atau hal ini telah dan sedang berlangsung. Kredit dagang dan uang muka tidak mencakup kredit untuk membiayai kredit dagang yang diklasifikasi sebagai pinjaman.

F89 Hutang/Piutang Lainnya

Kategori ini mencakup penerimaan dan pembayaran selain yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah yang tidak berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Kategori ini mencakup jumlah yang terkait dengan pajak, dividen, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, dan kontribusi sosial. Bunga yang diperoleh namun tidak dibayarkan termasuk dalam item ini, hanya jika bunga yang diperoleh tidak ditambahkan pada nilai aset yang mana bunga dibayar (seperti yang biasa terjadi).

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 3
Matrik NAD Indonesia
Menurut Kategori Transaksi dan Sektor
2013-2017

<https://www.scribd.com/document/348111111/Matrik-NAD-Indonesia-2013-2017>

TABEL 3. NERACA ARUS DANA
TABLE 3. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2.046,57		167,11		-30,81		735,22
P5g	Investasi NonFinansial	2.479,26		60,83		180,86		502,23	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-432,69		106,28		-211,67		232,99	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	325,34		-69,07		-35,51		-241,72	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-758,03		175,35		-176,16		474,71
A	Perolehan neto aset finansial	-137,90		822,70		38,91		790,45	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		620,14		647,35		215,07		315,74
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-4,23					
F11	Emas Moneter			-2,58					
F12	Hak Tarik Khusus			-1,65					
F2	Uang dan Simpanan	119,26		-27,58	367,76	15,10		256,63	
F21	Uang	29,23		3,01	60,30	0,00		29,23	
F22	Transferable deposits	40,11		-54,32	-30,26	-10,66		-4,34	
F29	Simpanan lainnya	49,92		23,74	337,72	25,76		231,75	
F3	Surat Berharga	-115,01	1,42	153,69	35,58	0,27	221,65	32,51	
F31	Jangka pendek	12,27	0,00	45,52	30,53	0,00	1,71	1,11	
F32	Jangka panjang	-127,28	1,42	108,17	5,05	0,27	219,94	31,40	
F4	Pinjaman	38,09	337,08	539,45	61,11	0,00	-6,57	-20,84	216,73
F41	Jangka pendek	0,00	18,38	45,98	-6,42	0,00	6,25	-20,84	10,30
F42	Jangka panjang	38,09	318,70	493,47	67,53	0,00	-12,83	0,00	206,43
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-228,04	274,34	153,65	103,26	12,88	0,00	371,74	0,00
F51	Ekuitas	-228,06	274,34	153,92	123,18	12,88		371,48	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,02	0,00	-0,27	-19,92	0,00		0,26	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	7,20	0,00	4,80	63,39	0,00	0,00	51,40	0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	7,20		4,80	23,99	0,00		12,00	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				35,33			35,33	
F63	Hak pensiunan				4,08			4,08	
F7	Transaksi derivatives	0,00		-3,71	-7,21	0,00		0,00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	40,61	7,29	6,64	23,45	10,66	0,00	99,01	99,01
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	9,29	5,65		0,00	0,00	0,00	-52,13	-52,13
F89	Hutang/Piutang lainnya	31,32	1,64	6,64	23,45	10,66	0,00	151,15	151,15
	TOTAL	-137,90	-137,90	822,70	822,70	38,91	38,91	790,45	790,45

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2013 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2013 (Trillion Rp)

LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	12,01		2.930,11		299,48		3.229,59	Saving, gross	B8g
6,40		3.229,59				3.229,59		Gross Capital Formation	P5g
5,61		-299,48		299,48		0,00		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
21,32		0,37		-0,37		0,00		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
	-15,71		-299,85		299,85		0,00	Net change in financial position (A-L)	B9f
6,61		1.520,77		398,79		1.919,56		Net acquisition of financial assets	A
	22,32		1.820,63		98,93		1.919,56	Net acquisition of financial liabilities	L
		-4,23		4,23		0,00	0,00	Monetary gold and SDRs	F1
		-2,58		2,58		0,00	0,00	<i>Monetary gold</i>	F11
		-1,65		1,65		0,00	0,00	<i>SDRs</i>	F12
2,82		366,23	367,76	15,77	14,24	382,00	382,00	Currency and deposits	F2
0,00		61,46	60,30	0,00	1,16	61,46	61,46	<i>Currency</i>	F21
-1,05		-30,26	-30,26	0,00	0,00	-30,26	-30,26	<i>Transferable deposits</i>	F22
3,87		335,04	337,72	15,77	13,09	350,80	350,80	<i>Other deposits</i>	F29
0,27		71,73	258,65	144,20	-42,72	215,93	215,93	Debt securities	F3
0,00		58,90	32,24	-26,66	0,00	32,24	32,24	<i>Short-term</i>	F31
0,27		12,83	226,41	170,86	-42,72	183,70	183,70	<i>Long-term</i>	F32
0,00	22,32	556,69	630,67	64,02	-9,96	620,71	620,71	Loans	F4
0,00	0,00	25,13	28,51	3,38	0,00	28,51	28,51	<i>Short-term</i>	F41
0,00	22,32	531,56	602,16	60,65	-9,96	592,20	592,20	<i>Long-term</i>	F42
3,52	0,00	313,74	377,60	189,11	125,25	502,85	502,85	Equity and investment fund shares	F5
2,48		312,69	397,52	210,09	125,25	522,78	522,78	<i>Equity</i>	F51
1,04		1,05	-19,92	-20,98	0,00	-19,92	-19,92	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0,00	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	63,39	63,39	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0,00		23,99	23,99	0,00	0,00	23,99	23,99	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
		35,33	35,33	0,00	0,00	35,33	35,33	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
		4,08	4,08	0,00	0,00	4,08	4,08	<i>Pension entitlements</i>	F63
0,00		-3,71	-7,21	-7,21	-3,71	-10,91	-10,91	Financial derivatives	F7
0,00	0,00	156,92	129,76	-11,34	15,82	145,58	145,58	Other accounts receivable/payable	F8
		-42,85	-46,48	5,65	9,29	-37,19	-37,19	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	0,00	199,77	176,24	-17,00	6,53	182,77	182,77	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
6,61	6,61	1.520,77	1.520,77	398,79	398,79	1.919,56	1.919,56	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 4. NERACA ARUS DANA
TABLE 4. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2.378,95		220,75		-79,34		796,51
P5g	Investasi NonFinansial	2.823,47		81,03		147,35		599,80	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-444,51		139,72		-226,69		196,71	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	323,33		74,86		-68,35		-295,01	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-767,85		64,86		-158,34		491,72
A	Perolehan neto aset finansial	897,35		1.044,72		32,37		725,54	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.665,19		979,86		190,71		233,82
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			9,59					
F11	Emas Moneter			5,21					
F12	Hak Tarik Khusus			4,38					
F2	Uang dan Simpanan	73,04		200,89	572,63	31,18		289,58	
F21	Uang	15,67		42,88	28,52	0,00		15,67	
F22	Transferable deposits	12,27		83,39	108,20	8,94		1,61	
F29	Simpanan lainnya	45,10		74,63	435,91	22,24		272,30	
F3	Surat Berharga	52,50	0,61	63,88	5,53	-0,07	249,26	-2,26	
F31	Jangka pendek	-7,97	0,00	-2,95	1,42	0,00	4,14	-0,11	
F32	Jangka panjang	60,46	0,61	66,83	4,11	-0,07	245,12	-2,15	
F4	Pinjaman	54,36	303,16	381,57	114,01	0,00	-58,55	-20,97	186,38
F41	Jangka pendek	0,00	37,13	18,11	70,10	0,00	-56,91	-20,97	1,84
F42	Jangka panjang	54,36	266,03	363,46	43,91	0,00	-1,64	0,00	184,55
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	723,14	1.240,55	282,37	257,96	10,20	0,00	333,55	0,00
F51	Ekuitas	723,05	1.240,55	225,82	213,50	10,20		333,57	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,09	0,00	56,55	44,45	0,00		-0,01	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,94	0,00	0,63	79,76	0,00	0,00	78,18	0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,94		0,63	3,15	0,00		1,57	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				52,78			52,78	
F63	Hak pensiunan				23,83			23,83	
F7	Transaksi derivatives	0,00		-5,27	-7,13	0,00		0,00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	-6,64	120,87	111,06	-42,89	-8,94	0,00	47,44	47,44
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	10,59	2,39		0,00	0,00	0,00	-144,28	-144,28
F89	Hutang/Piutang lainnya	-17,23	118,48	111,06	-42,89	-8,94	0,00	191,72	191,72
	TOTAL	897,35	897,35	1.044,72	1.044,72	32,37	32,37	725,54	725,54

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2014 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2014 (Trillion Rp)

LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	14,99		3.331,86		325,29		3.657,15	Saving, gross	B8g
5,51			3.657,15				3.657,15	Gross Capital Formation	P5g
9,49			-325,29		325,29		0,00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
-8,68			26,16		-26,16		0,00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
	18,16		-351,45		351,45		0,00	Net change in financial position (A-L)	B9f
14,41			2.714,38		616,67		3.331,04	Net acquisition of financial assets	A
	-3,76		3.065,83		265,22		3.331,04	Net acquisition of financial liabilities	L
			9,59		-9,59		0,00	Monetary gold and SDRs	F1
			5,21		-5,21		0,00	<i>Monetary gold</i>	F11
			4,38		-4,38		0,00	<i>SDRs</i>	F12
8,99		603,68	572,63	27,75	58,80	631,43	631,43	Currency and deposits	F2
0,00		74,22	28,52	0,00	45,70	74,22	74,22	<i>Currency</i>	F21
1,99		108,20	108,20	0,00	0,00	108,20	108,20	<i>Transferable deposits</i>	F22
7,00		421,26	435,91	27,75	13,10	449,00	449,00	<i>Other deposits</i>	F29
-0,07		113,99	255,40	237,69	96,29	351,68	351,68	Debt securities	F3
0,00		-11,02	5,55	16,58	0,00	5,55	5,55	<i>Short-term</i>	F31
-0,07		125,01	249,84	221,12	96,29	346,13	346,13	<i>Long-term</i>	F32
0,00	-3,76	414,96	541,25	128,74	2,46	543,70	543,70	Loans	F4
0,00	0,00	-2,85	52,16	55,01	0,00	52,16	52,16	<i>Short-term</i>	F41
0,00	-3,76	417,82	489,09	73,73	2,46	491,55	491,55	<i>Long-term</i>	F42
5,48	0,00	1.354,75	1.498,51	266,45	122,69	1.621,20	1.621,20	Equity and investment fund shares	F5
1,84		1.294,48	1.454,05	282,27	122,69	1.576,75	1.576,75	<i>Equity</i>	F51
3,64		60,27	44,45	-15,82	0,00	44,45	44,45	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0,00	0,00	79,76	79,76	0,00	0,00	79,76	79,76	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0,00		3,15	3,15	0,00	0,00	3,15	3,15	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
		52,78	52,78	0,00	0,00	52,78	52,78	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
		23,83	23,83	0,00	0,00	23,83	23,83	<i>Pension entitlements</i>	F63
0,00		-5,27	-7,13	-7,13	-5,27	-12,40	-12,40	Financial derivatives	F7
0,00	0,00	142,92	125,42	-27,25	-9,75	115,67	115,67	Other accounts receivable/payable	F8
		-133,69	-141,89	2,39	10,59	-131,30	-131,30	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	0,00	276,61	267,31	-29,64	-20,34	246,97	246,97	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
14,41	14,41	2.714,38	2.714,38	616,67	616,67	3.331,04	3.331,04	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 5. NERACA ARUS DANA
TABLE 5. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2.689,64		206,14		-83,06		877,41
P5g	Investasi NonFinansial	2.991,26		81,13		215,43		645,86	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-301,62		125,01		-298,50		231,55	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-196,51		-61,07		63,18		214,82	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-105,11		186,08		-361,68		16,73
A	Perolehan neto aset finansial	-18,96		456,00		5,45		313,03	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		86,15		269,92		367,13		296,30
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-1,05					
F11	Emas Moneter			-0,61					
F12	Hak Tarik Khusus			-0,44					
F2	Uang dan Simpanan	142,17		193,38	412,62	-34,99		168,41	
F21	Uang	48,67		7,55	58,23	0,00		48,67	
F22	Transferable deposits	51,64		158,16	206,90	-15,84		4,71	
F29	Simpanan lainnya	41,86		27,68	147,49	-19,14		115,04	
F3	Surat Berharga	-22,76	9,17	65,46	-58,48	0,54	360,55	12,39	
F31	Jangka pendek	65,63	0,00	-78,23	-73,09	0,00	27,61	0,25	
F32	Jangka panjang	-88,38	9,17	143,69	14,60	0,54	332,94	12,14	
F4	Pinjaman	19,71	207,88	313,24	-22,60	0,00	6,58	29,37	166,21
F41	Jangka pendek	0,00	-26,02	-2,86	-87,97	0,00	-22,91	29,37	30,76
F42	Jangka panjang	19,71	233,90	316,10	65,38	0,00	29,49	0,00	135,45
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-194,08	-46,87	-17,83	-67,16	24,05	0,00	-39,35	0,00
F51	Ekuitas	-194,26	-46,87	-54,98	-101,89	24,05		-39,16	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,18	0,00	37,15	34,72	0,00		-0,19	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	2,29	0,00	1,52	15,93	0,00	0,00	12,12	0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	2,29		1,52	7,62	0,00		3,81	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				-10,47			-10,47	
F63	Hak pensiunan				18,78			18,78	
F7	Transaksi derivatives	0,00		-8,85	-8,65	0,00		0,00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	33,72	-84,03	-89,86	-1,75	15,84	0,00	130,09	130,09
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	29,32	5,62		0,00	0,00	0,00	-56,92	-56,92
F89	Hutang/Piutang lainnya	4,40	-89,66	-89,86	-1,75	15,84	0,00	187,01	187,01
	TOTAL	-18,96	-18,96	456,00	456,00	5,45	5,45	313,03	313,03

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

INDONESIA, 2015* (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2015* (Trillion Rp)

LNPRT	TOTAL EKONOMI DOMESTIK				LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
	NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	16,23		3.706,35		234,55		3.940,90	Saving, gross	B8g	
7,22			3.940,90				3.940,90	Gross Capital Formation	P5g	
9,01			-234,55		234,55		0,00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c	
-14,75			5,68		-5,68		0,00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>		
	23,76		-240,22		240,22		0,00	Net change in financial position (A-L)	B9f	
27,34			782,85		509,10		1.291,96	Net acquisition of financial assets	A	
	3,58		1.023,08		268,88		1.291,96	Net acquisition of financial liabilities	L	
			-1,05		1,05		0,00	Monetary gold and SDRs	F1	
			-0,61		0,61		0,00	<i>Monetary gold</i>	F11	
			-0,44		0,44		0,00	<i>SDRs</i>	F12	
27,72			496,69	412,62	10,61	94,69	507,31	507,31	Currency and deposits	F2
0,00			104,88	58,23	0,00	46,65	104,88	104,88	<i>Currency</i>	F21
8,24			206,90	206,90	0,00	0,00	206,90	206,90	<i>Transferable deposits</i>	F22
19,48			184,91	147,49	10,61	48,04	195,53	195,53	<i>Other deposits</i>	F29
0,54			56,17	311,23	249,77	-5,29	305,94	305,94	Debt securities	F3
0,00			-12,36	-45,48	-33,12	0,00	-45,48	-45,48	<i>Short-term</i>	F31
0,54			68,53	356,71	282,90	-5,29	351,42	351,42	<i>Long-term</i>	F32
0,00	3,58		362,32	361,66	26,67	27,33	388,99	388,99	Loans	F4
0,00	0,00		26,51	-106,14	-132,65	0,00	-106,14	-106,14	<i>Short-term</i>	F41
0,00	3,58		335,81	467,80	159,32	27,33	495,13	495,13	<i>Long-term</i>	F42
-0,93	0,00		-228,14	-114,03	230,34	116,23	2,20	2,20	Equity and investment fund shares	F5
1,66			-262,69	-148,75	230,16	116,23	-32,53	-32,52	<i>Equity</i>	F51
-2,59			34,55	34,72	0,18	0,00	34,72	34,72	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0,00	0,00		15,93	15,93	0,00	0,00	15,93	15,93	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0,00			7,62	7,62	0,00	0,00	7,62	7,62	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
			-10,47	-10,47	0,00	0,00	-10,47	-10,47	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
			18,78	18,78	0,00	0,00	18,78	18,78	<i>Pension entitlements</i>	F63
0,00			-8,85	-8,65	-8,65	-8,85	-17,50	-17,50	Financial derivatives	F7
0,00	0,00		89,79	44,31	-0,69	44,78	89,09	89,09	Other accounts receivable/payable	F8
			-27,60	-51,29	5,62	29,32	-21,98	-21,98	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	0,00		117,39	95,60	-6,32	15,47	111,07	111,07	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
27,34	27,34		782,85	782,85	509,10	509,10	1.291,96	1.291,96	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary Figures

** = Very Preliminary Figures

TABEL 5. NERACA ARUS DANA
TABLE 5. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2.952,51		270,45		-148,79		938,23
P5g	Investasi NonFinansial	3.310,12		96,83		167,22		672,28	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-357,61		173,62		-316,01		265,96	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	111,85		167,29		-33,66		-251,97	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-469,46		6,33		-282,36		517,93
A	Perolehan neto aset finansial	1.074,38		917,57		0,76		999,87	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1.543,84		911,24		283,12		481,94
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			6,51					
F11	Emas Moneter			4,38					
F12	Hak Tarik Khusus			2,13					
F2	Uang dan Simpanan	224,66		-2,41	552,91	26,40		283,89	
F21	Uang	9,72		2,34	25,78	0,00		9,72	
F22	Transferable deposits	119,61		18,22	178,74	-3,06		46,58	
F29	Simpanan lainnya	95,33		-22,98	348,39	29,47		227,59	
F3	Surat Berharga	248,40	2,92	146,28	108,79	0,10	407,85	22,06	
F31	Jangka pendek	-16,98	0,00	29,87	56,09	0,00	-53,00	0,09	
F32	Jangka panjang	265,38	2,92	116,41	52,70	0,10	460,85	21,98	
F4	Pinjaman	-12,29	298,31	376,01	-75,25	0,00	-124,73	41,35	221,22
F41	Jangka pendek	0,00	191,96	24,23	-43,98	0,00	-70,41	41,35	76,71
F42	Jangka panjang	-12,29	106,35	351,78	-31,26	0,00	-54,32	0,00	144,50
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	558,52	1.213,61	382,70	264,51	-28,81	0,00	293,45	0,00
F51	Ekuitas	561,66	1.213,61	343,71	201,81	-28,81		293,04	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-3,14	0,00	38,99	62,70	0,00		0,41	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	1,28	0,00	0,86	100,53	0,00	0,00	98,39	0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	1,28		0,86	4,28	0,00		2,14	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				64,47			64,47	
F63	Hak pensiunan				31,79			31,79	
F7	Transaksi derivatives	0,00		-8,13	-8,26	0,00		0,00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	53,83	29,00	15,76	-31,99	3,06	0,00	260,72	260,72
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	13,21	13,27		0,00	0,00	0,00	31,67	31,67
F89	Hutang/Piutang lainnya	40,62	15,73	15,76	-31,99	3,06	0,00	229,05	229,05
	TOTAL	1.074,38	1.074,38	917,57	917,57	0,76	0,76	999,87	999,87

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

INDONESIA, 2016** (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2016** (Trillion Rp)

LNPRT	TOTAL EKONOMI DOMESTIK				LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
	NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	17,09		4.029,49		225,11		4.254,60	Saving, gross	B8g	
8,15			4.254,60				4.254,60	Gross Capital Formation	P5g	
8,94			-225,11		225,11		0,00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c	
10,54			4,04		-4,04		0,00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>		
	-1,60		-229,16		229,16		0,00	Net change in financial position (A-L)	B9f	
9,75			3.002,33		220,36		3.222,69	Net acquisition of financial assets	A	
	11,34		3.231,49		-8,80		3.222,69	Net acquisition of financial liabilities	L	
			6,51		-6,51		0,00	Monetary gold and SDRs	F1	
			4,38		-4,38		0,00	<i>Monetary gold</i>	F11	
			2,13		-2,13		0,00	<i>SDRs</i>	F12	
3,65			536,18	552,91	-6,37	-23,10	529,81	529,81	Currency and deposits	F2
0,00			21,79	25,78	0,00	-3,99	21,79	21,79	<i>Currency</i>	F21
-2,61			178,74	178,74	0,00	0,00	178,74	178,74	<i>Transferable deposits</i>	F22
6,26			335,66	348,39	-6,37	-19,10	329,29	329,29	<i>Other deposits</i>	F29
0,10			416,94	519,56	206,13	103,51	623,07	623,07	Debt securities	F3
0,00			12,98	3,09	-9,89	0,00	3,09	3,09	<i>Short-term</i>	F31
0,10			403,96	516,46	216,02	103,51	619,98	619,98	<i>Long-term</i>	F32
0,00	11,34		405,07	330,89	-80,11	-5,94	324,96	324,96	Loans	F4
0,00	0,00		65,58	154,28	88,70	0,00	154,28	154,28	<i>Short-term</i>	F41
0,00	11,34		339,49	176,61	-168,81	-5,94	170,67	170,67	<i>Long-term</i>	F42
6,00	0,00		1.211,86	1.478,13	128,38	-137,88	1.340,24	1.340,24	Equity and investment fund shares	F5
3,44			1.173,04	1.415,42	104,50	-137,88	1.277,54	1.277,54	<i>Equity</i>	F51
2,57			38,82	62,70	23,88	0,00	62,70	62,70	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0,00	0,00		100,53	100,53	0,00	0,00	100,53	100,53	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0,00			4,28	4,28	0,00	0,00	4,28	4,28	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
			64,47	64,47	0,00	0,00	64,47	64,47	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
			31,79	31,79	0,00	0,00	31,79	31,79	<i>Pension entitlements</i>	F63
0,00			-8,13	-8,26	-8,26	-8,13	-16,39	-16,39	Financial derivatives	F7
0,00	0,00		333,38	257,74	-12,90	62,74	320,48	320,48	Other accounts receivable/payable	F8
			44,88	44,94	13,27	13,21	58,15	58,15	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	0,00		288,50	212,80	-26,17	49,53	262,33	262,33	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
9,75	9,75		3.002,33	3.002,33	220,36	220,36	3.222,69	3.222,69	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary Figures

** = Very Preliminary Figures

TABEL 5. NERACA ARUS DANA
TABLE 5. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		3.108,73		356,14		-132,32		959,94
P5g	Investasi NonFinansial	3.556,07		141,38		208,66		630,00	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-447,33		214,75		-340,98		329,94	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	205,49		210,82		-51,65		-390,63	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-652,82		3,93		-289,32		720,56
A	Perolehan neto aset finansial	1.745,33		1.082,16		122,95		1.422,15	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		2.398,15		1.078,23		412,28		701,59
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			5,89					
F11	Emas Moneter			3,98					
F12	Hak Tarik Khusus			1,91					
F2	Uang dan Simpanan	266,29		126,39	654,46	124,39		258,32	
F21	Uang	64,30		18,74	82,28	0,00		64,30	
F22	Transferable deposits	87,98		36,25	121,91	5,87		-19,29	
F29	Simpanan lainnya	114,02		71,41	450,26	118,51		213,32	
F3	Surat Berharga	162,26	8,37	77,57	-65,00	0,04	495,17	2,00	
F31	Jangka pendek	16,64	0,00	-64,29	-76,20	0,00	56,88	1,34	
F32	Jangka panjang	145,61	8,37	141,87	11,20	0,04	438,29	0,65	
F4	Pinjaman	42,50	247,36	380,43	50,69	0,00	-82,89	126,86	317,91
F41	Jangka pendek	0,00	108,92	27,33	30,93	0,00	-66,19	126,86	140,12
F42	Jangka panjang	42,50	138,44	353,09	19,75	0,00	-16,70	0,00	177,79
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	1.207,74	1.671,82	453,68	715,38	4,41	0,00	529,22	0,00
F51	Ekuitas	1.205,29	1.671,82	363,64	603,40	4,41		528,77	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	2,45	0,00	90,04	111,98	0,00		0,45	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	-4,86	0,00	-3,24	113,98	0,00	0,00	122,08	0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	-4,86		-3,24	-16,20	0,00		-8,10	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				107,54			107,54	
F63	Hak pensiunan				22,63			22,63	
F7	Transaksi derivatives	0,00		-5,90	-7,62	0,00		0,00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	71,40	470,60	47,34	-383,65	-5,87	0,00	383,67	383,67
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	16,98	22,02		0,00	0,00	0,00	39,22	39,22
F89	Hutang/Piutang lainnya	54,43	448,57	47,34	-383,65	-5,87	0,00	344,46	344,46
	TOTAL	1.745,33	1.745,33	1.082,16	1.082,16	122,95	122,95	1.422,15	1.422,15

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

INDONESIA, 2017*** (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2017*** (Trillion Rp)

LNPRT	TOTAL EKONOMI DOMESTIK				LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
	NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	21,09		4.313,57		231,50		4.545,07	Saving, gross	B8g	
8,97			4.545,07				4.545,07	Gross Capital Formation	P5g	
12,12			-231,50		231,50		0,00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c	
30,20			4,23		-4,23		0,00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>		
	-18,08		-235,73		235,73		0,00	Net change in financial position (A-L)	B9f	
1,69			4.374,29		637,16		5.011,44	Net acquisition of financial assets	A	
	19,77		4.610,02		401,43		5.011,44	Net acquisition of financial liabilities	L	
			5,89		-5,89		0,00	Monetary gold and SDRs	F1	
			3,98		-3,98		0,00	<i>Monetary gold</i>	F11	
			1,91		-1,91		0,00	<i>SDRs</i>	F12	
-5,98			769,42	654,46	2,54	117,50	771,96	771,96	Currency and deposits	F2
0,00			147,33	82,28	0,00	65,05	147,33	147,33	<i>Currency</i>	F21
11,10			121,91	121,91	0,00	0,00	121,91	121,91	<i>Transferable deposits</i>	F22
-17,08			500,17	450,26	2,54	52,46	502,72	502,72	<i>Other deposits</i>	F29
0,04			241,90	438,54	354,92	158,28	596,82	596,82	Debt securities	F3
0,00			-46,30	-19,32	26,98	0,00	-19,32	-19,32	<i>Short-term</i>	F31
0,04			288,20	457,86	327,94	158,28	616,14	616,14	<i>Long-term</i>	F32
0,00	19,77		549,79	552,84	27,39	24,34	577,18	577,18	Loans	F4
0,00	0,00		154,19	213,79	59,60	0,00	213,79	213,79	<i>Short-term</i>	F41
0,00	19,77		395,59	339,05	-32,20	24,34	363,39	363,39	<i>Long-term</i>	F42
7,63	0,00		2.202,67	2.387,20	240,84	56,31	2.443,51	2.443,51	Equity and investment fund shares	F5
4,81			2.106,91	2.275,22	224,62	56,31	2.331,53	2.331,53	<i>Equity</i>	F51
2,82			95,76	111,98	16,22	0,00	111,98	111,98	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0,00	0,00		113,98	113,98	0,00	0,00	113,98	113,98	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0,00			-16,20	-16,20	0,00	0,00	-16,20	-16,20	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
			107,54	107,54	0,00	0,00	107,54	107,54	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
			22,63	22,63	0,00	0,00	22,63	22,63	<i>Pension entitlements</i>	F63
0,00			-5,90	-7,62	-7,62	-5,90	-13,51	-13,51	Financial derivatives	F7
0,00	0,00		496,54	470,61	24,96	50,89	521,50	521,50	Other accounts receivable/payable	F8
			56,19	61,24	22,02	16,98	78,22	78,22	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	0,00		440,35	409,37	2,93	33,91	443,29	443,29	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
1,69	1,69		4.374,29	4.374,29	637,16	637,16	5.011,44	5.011,44	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary Figures

** = Very Preliminary Figures

Lampiran 4
Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor
2013-2017

<https://www.kemendagri.go.id>

TABEL 6. NERACA ARUS DANA INDONESIA SEKTOR
TABLE 6. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF NON-

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2013		2014		2015*
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA
B8g	Tabungan Bruto		2.046,57		2.378,95	
P5g	Investasi NonFinansial	2.479,26		2.823,47		2.991,26
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-432,69		-444,51		-301,62
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	325,34		323,33		-196,51
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-758,03		-767,85	
A	Perolehan neto aset finansial	-137,90		897,35		-18,96
L	Perolehan neto kewajiban finansial		620,14		1.665,19	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	119,26		73,04		142,17
F21	Uang	29,23		15,67		48,67
F22	<i>Transferable deposits</i>	40,11		12,27		51,64
F29	Simpanan lainnya	49,92		45,10		41,86
F3	Surat Berharga	-115,01	1,42	52,50	0,61	-22,76
F31	Jangka pendek	12,27	0,00	-7,97	0,00	65,63
F32	Jangka panjang	-127,28	1,42	60,46	0,61	-88,38
F4	Pinjaman	38,09	337,08	54,36	303,16	19,71
F41	Jangka pendek	0,00	18,38	0,00	37,13	0,00
F42	Jangka panjang	38,09	318,70	54,36	266,03	19,71
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-228,04	274,34	723,14	1.240,55	-194,08
F51	Ekuitas	-228,06	274,34	723,05	1.240,55	-194,26
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,02	0,00	0,09	0,00	0,18
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	7,20		0,94		2,29
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	7,20		0,94		2,29
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa					
F63	Hak pensiunan					
F7	Transaksi derivatives	0,00		0,00		0,00
F8	Hutang/Piutang lainnya	40,61	7,29	-6,64	120,87	33,72
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	9,29	5,65	10,59	2,39	29,32
F89	Hutang/Piutang lainnya	31,32	1,64	-17,23	118,48	4,40
	TOTAL	-137,90	-137,90	897,35	897,35	-18,96

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

KORPORASI NON-FINANSIAL, 2013-2017 (TRILIUN Rp)
FINANCIAL CORPORATIONS SECTOR, 2013-2017 (TRILLION Rp)

2015*	2016**		2017***		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
2.689,64		2.952,51			3.108,73	Saving, gross	B8g
	3.310,12		3.556,07			Gross Capital Formation	P5g
	-357,61		-447,33			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	111,85		205,49			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
-105,11		-469,46			-652,82	Net change in financial position (A-L)	B9f
	1.074,38		1.745,33			Net acquisition of financial assets	A
86,15		1.543,84			2.398,15	Net acquisition of financial liabilities	L
						Monetary gold and SDRs	F1
						<i>Monetary gold</i>	F11
						<i>SDRs</i>	F12
	224,66		266,29			Currency and deposits	F2
	9,72		64,30			<i>Currency</i>	F21
	119,61		87,98			<i>Transferable deposits</i>	F22
	95,33		114,02			<i>Other deposits</i>	F29
9,17	248,40	2,92	162,26	8,37		Debt securities	F3
0,00	-16,98	0,00	16,64	0,00		<i>Short-term</i>	F31
9,17	265,38	2,92	145,61	8,37		<i>Long-term</i>	F32
207,88	-12,29	298,31	42,50	247,36		Loans	F4
-26,02	0,00	191,96	0,00	108,92		<i>Short-term</i>	F41
233,90	-12,29	106,35	42,50	138,44		<i>Long-term</i>	F42
-46,87	558,52	1.213,61	1.207,74	1.671,82		Equity and investment fund shares	F5
-46,87	561,66	1.213,61	1.205,29	1.671,82		<i>Equity</i>	F51
0,00	-3,14	0,00	2,45	0,00		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	1,28		-4,86			Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	1,28		-4,86			<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
						<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
						<i>Pension entitlements</i>	F63
	0,00		0,00			Financial derivatives	F7
-84,03	53,83	29,00	71,40	470,60		Other accounts receivable/payable	F8
5,62	13,21	13,27	16,98	22,02		<i>Trade credits and advances</i>	F81
-89,66	40,62	15,73	54,43	448,57		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
-18,96	1.074,38	1.074,38	1.745,33	1.745,33		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary figures

** = Very Preliminary figures

TABEL 7. NERACA ARUS DANA INDONESIA SEKTOR
TABLE 7. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF FINAN

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2013		2014		2015*
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA
B8g	Tabungan Bruto		167,11		220,75	
P5g	Investasi NonFinansial	60,83		81,03		81,13
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	106,28		139,72		125,01
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-69,07		74,86		-61,07
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		175,35		64,86	
A	Perolehan neto aset finansial	822,70		1.044,72		456,00
L	Perolehan neto kewajiban finansial		647,35		979,86	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	-4,23		9,59		-1,05
F11	Emas Moneter	-2,58		5,21		-0,61
F12	Hak Tarik Khusus	-1,65		4,38		-0,44
F2	Uang dan Simpanan	-27,58	367,76	200,89	572,63	193,38
F21	Uang	3,01	60,30	42,88	28,52	7,55
F22	<i>Transferable deposits</i>	-54,32	-30,26	83,39	108,20	158,16
F29	Simpanan lainnya	23,74	337,72	74,63	435,91	27,68
F3	Surat Berharga	153,69	35,58	63,88	5,53	65,46
F31	Jangka pendek	45,52	30,53	-2,95	1,42	-78,23
F32	Jangka panjang	108,17	5,05	66,83	4,11	143,69
F4	Pinjaman	539,45	61,11	381,57	114,01	313,24
F41	Jangka pendek	45,98	-6,42	18,11	70,10	-2,86
F42	Jangka panjang	493,47	67,53	363,46	43,91	316,10
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	153,65	103,26	282,37	257,96	-17,83
F51	Ekuitas	153,92	123,18	225,82	213,50	-54,98
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-0,27	-19,92	56,55	44,45	37,15
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	4,80	63,39	0,63	79,76	1,52
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	4,80	23,99	0,63	3,15	1,52
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa		35,33		52,78	
F63	Hak pensiunan		4,08		23,83	
F7	Transaksi derivatives	-3,71	-7,21	-5,27	-7,13	-8,85
F8	Hutang/Piutang lainnya	6,64	23,45	111,06	-42,89	-89,86
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F89	Hutang/Piutang lainnya	6,64	23,45	111,06	-42,89	-89,86
	TOTAL	822,70	822,70	1.044,72	1.044,72	456,00

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

KORPORASI FINANSIAL, 2013-2017 (TRILIUN Rp)
CIAL CORPORATIONS SECTOR, 2013-2017 (TRILLION Rp)

2015*	2016**		2017***		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
206,14		270,45			356,14	Saving, gross	B8g
	96,83		141,38			Gross Capital Formation	P5g
	173,62		214,75			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	167,29		210,82			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
186,08		6,33			3,93	Net change in financial position (A-L)	B9f
	917,57		1.082,16			Net acquisition of financial assets	A
269,92		911,24			1.078,23	Net acquisition of financial liabilities	L
	6,51		5,89			Monetary gold and SDRs	F1
	4,38		3,98			<i>Monetary gold</i>	F11
	2,13		1,91			<i>SDRs</i>	F12
412,62	-2,41	552,91	126,39	654,46		Currency and deposits	F2
58,23	2,34	25,78	18,74	82,28		<i>Currency</i>	F21
206,90	18,22	178,74	36,25	121,91		<i>Transferable deposits</i>	F22
147,49	-22,98	348,39	71,41	450,26		<i>Other deposits</i>	F29
-58,48	146,28	108,79	77,57	-65,00		Debt securities	F3
-73,09	29,87	56,09	-64,29	-76,20		<i>Short-term</i>	F31
14,60	116,41	52,70	141,87	11,20		<i>Long-term</i>	F32
-22,60	376,01	-75,25	380,43	50,69		Loans	F4
-87,97	24,23	-43,98	27,33	30,93		<i>Short-term</i>	F41
65,38	351,78	-31,26	353,09	19,75		<i>Long-term</i>	F42
-67,16	382,70	264,51	453,68	715,38		Equity and investment fund shares	F5
-101,89	343,71	201,81	363,64	603,40		<i>Equity</i>	F51
34,72	38,99	62,70	90,04	111,98		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
15,93	0,86	100,53	-3,24	113,98		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
7,62	0,86	4,28	-3,24	-16,20		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
-10,47		64,47		107,54		<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
18,78		31,79		22,63		<i>Pension entitlements</i>	F63
-8,65	-8,13	-8,26	-5,90	-7,62		Financial derivatives	F7
-1,75	15,76	-31,99	47,34	-383,65		Other accounts receivable/payable	F8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Trade credits and advances</i>	F81
-1,75	15,76	-31,99	47,34	-383,65		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
456,00	917,57	917,57	1.082,16	1.082,16		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary figures

** = Very Preliminary figures

TABEL 8. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2013		2014		2015*
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		-30,81		-79,34	
P5g	Investasi NonFinansial	180,86		147,35		215,43
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-211,67		-226,69		-298,50
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-35,51		-68,35		63,18
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-176,16		-158,34	
A	Perolehan neto aset finansial	38,91		32,37		5,45
L	Perolehan neto kewajiban finansial		215,07		190,71	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	15,10		31,18		-34,99
F21	Uang	0,00		0,00		0,00
F22	<i>Transferable deposits</i>	-10,66		8,94		-15,84
F29	Simpanan lainnya	25,76		22,24		-19,14
F3	Surat Berharga	0,27	221,65	-0,07	249,26	0,54
F31	Jangka pendek	0,00	1,71	0,00	4,14	0,00
F32	Jangka panjang	0,27	219,94	-0,07	245,12	0,54
F4	Pinjaman	0,00	-6,57	0,00	-58,55	0,00
F41	Jangka pendek	0,00	6,25	0,00	-56,91	0,00
F42	Jangka panjang	0,00	-12,83	0,00	-1,64	0,00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	12,88		10,20		24,05
F51	Ekuitas	12,88		10,20		24,05
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,00		0,00		0,00
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,00		0,00		0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,00		0,00		0,00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa					
F63	Hak pensiunan					
F7	Transaksi derivatives	0,00		0,00		0,00
F8	Hutang/Piutang lainnya	10,66	0,00	-8,94	0,00	15,84
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F89	Hutang/Piutang lainnya	10,66	0,00	-8,94	0,00	15,84
	TOTAL	38,91	38,91	32,37	32,37	5,45

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

SEKTOR PEMERINTAH, 2013-2017 (TRILIUN Rp)
OF GOVERNMENT SECTOR, 2013-2017 (TRILLION Rp)

2015*	2016**		2017***		Transaction Categories	Code
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA		
-83,06		-148,79			Saving, gross	B8g
	167,22		208,66		Gross Capital Formation	P5g
	-316,01		-340,98		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	-33,66		-51,65		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
-361,68		-282,36			Net change in financial position (A-L)	B9f
	0,76		122,95		Net acquisition of financial assets	A
367,13		283,12			Net acquisition of financial liabilities	L
					Monetary gold and SDRs	F1
					<i>Monetary gold</i>	F11
					<i>SDRs</i>	F12
	26,40		124,39		Currency and deposits	F2
	0,00		0,00		<i>Currency</i>	F21
	-3,06		5,87		<i>Transferable deposits</i>	F22
	29,47		118,51		<i>Other deposits</i>	F29
360,55	0,10	407,85	0,04	495,17	Debt securities	F3
27,61	0,00	-53,00	0,00	56,88	<i>Short-term</i>	F31
332,94	0,10	460,85	0,04	438,29	<i>Long-term</i>	F32
6,58	0,00	-124,73	0,00	-82,89	Loans	F4
-22,91	0,00	-70,41	0,00	-66,19	<i>Short-term</i>	F41
29,49	0,00	-54,32	0,00	-16,70	<i>Long-term</i>	F42
	-28,81		4,41		Equity and investment fund shares	F5
	-28,81		4,41		<i>Equity</i>	F51
	0,00		0,00		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	0,00		0,00		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	0,00		0,00		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
					<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
					<i>Pension entitlements</i>	F63
	0,00		0,00		Financial derivatives	F7
0,00	3,06	0,00	-5,87	0,00	Other accounts receivable/payable	F8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	3,06	0,00	-5,87	0,00	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
5,45	0,76	0,76	122,95	122,95	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary figures

** = Very Preliminary figures

TABEL 9. NERACA ARUS DANA INDONESIA SEK
TABLE 9. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2013		2014		2015*
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA
B8g	Tabungan Bruto		735,22		796,51	
P5g	Investasi NonFinansial	502,23		599,80		645,86
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	232,99		196,71		231,55
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-241,72		-295,01		214,82
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		474,71		491,72	
A	Perolehan neto aset finansial	790,45		725,54		313,03
L	Perolehan neto kewajiban finansial		315,74		233,82	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	256,63		289,58		168,41
F21	Uang	29,23		15,67		48,67
F22	<i>Transferable deposits</i>	-4,34		1,61		4,71
F29	Simpanan lainnya	231,75		272,30		115,04
F3	Surat Berharga	32,51		-2,26		12,39
F31	Jangka pendek	1,11		-0,11		0,25
F32	Jangka panjang	31,40		-2,15		12,14
F4	Pinjaman	-20,84	216,73	-20,97	186,38	29,37
F41	Jangka pendek	-20,84	10,30	-20,97	1,84	29,37
F42	Jangka panjang	0,00	206,43	0,00	184,55	0,00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	371,74		333,55		-39,35
F51	Ekuitas	371,48		333,57		-39,16
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0,26		-0,01		-0,19
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	51,40		78,18		12,12
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	12,00		1,57		3,81
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	35,33		52,78		-10,47
F63	Hak pensiunan	4,08		23,83		18,78
F7	Transaksi derivatives	0,00		0,00		0,00
F8	Hutang/Piutang lainnya	99,01	99,01	47,44	47,44	130,09
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-52,13	-52,13	-144,28	-144,28	-56,92
F89	Hutang/Piutang lainnya	151,15	151,15	191,72	191,72	187,01
	TOTAL	790,45	790,45	725,54	725,54	313,03

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

TOR RUMAH TANGGA, 2013-2017 (TRILIUN Rp)
OF HOUSEHOLDS SECTOR, 2013-2017 (TRILLION Rp)

2015*	2016**		2017***		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
877,41		938,23			959,94	Saving, gross	B8g
	672,28		630,00			Gross Capital Formation	P5g
	265,96		329,94			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	-251,97		-390,63			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
16,73		517,93			720,56	Net change in financial position (A-L)	B9f
	999,87		1.422,15			Net acquisition of financial assets	A
296,30		481,94			701,59	Net acquisition of financial liabilities	L
						Monetary gold and SDRs	F1
						<i>Monetary gold</i>	F11
						<i>SDRs</i>	F12
	283,89		258,32			Currency and deposits	F2
	9,72		64,30			<i>Currency</i>	F21
	46,58		-19,29			<i>Transferable deposits</i>	F22
	227,59		213,32			<i>Other deposits</i>	F29
	22,06		2,00			Debt securities	F3
	0,09		1,34			<i>Short-term</i>	F31
	21,98		0,65			<i>Long-term</i>	F32
166,21	41,35	221,22	126,86	317,91		Loans	F4
30,76	41,35	76,71	126,86	140,12		<i>Short-term</i>	F41
135,45	0,00	144,50	0,00	177,79		<i>Long-term</i>	F42
	293,45		529,22			Equity and investment fund shares	F5
	293,04		528,77			<i>Equity</i>	F51
	0,41		0,45			<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	98,39		122,08			Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	2,14		-8,10			<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
	64,47		107,54			<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
	31,79		22,63			<i>Pension entitlements</i>	F63
	0,00		0,00			Financial derivatives	F7
130,09	260,72	260,72	383,67	383,67		Other accounts receivable/payable	F8
-56,92	31,67	31,67	39,22	39,22		<i>Trade credits and advances</i>	F81
187,01	229,05	229,05	344,46	344,46		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
313,03	999,87	999,87	1.422,15	1.422,15		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary figures

** = Very Preliminary figures

TABEL 10. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2013		2014		2015*
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA
B8g	Tabungan Bruto		12,01		14,99	
P5g	Investasi NonFinansial	6,40		5,51		7,22
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	5,61		9,49		9,01
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	21,32		-8,68		-14,75
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-15,71		18,16	
A	Perolehan neto aset finansial	6,61		14,41		27,34
L	Perolehan neto kewajiban finansial		22,32		-3,76	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	2,82		8,99		27,72
F21	Uang	0,00		0,00		0,00
F22	<i>Transferable deposits</i>	-1,05		1,99		8,24
F29	Simpanan lainnya	3,87		7,00		19,48
F3	Surat Berharga	0,27		-0,07		0,54
F31	Jangka pendek	0,00		0,00		0,00
F32	Jangka panjang	0,27		-0,07		0,54
F4	Pinjaman	0,00	22,32	0,00	-3,76	0,00
F41	Jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Jangka panjang	0,00	22,32	0,00	-3,76	0,00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	3,52		5,48		-0,93
F51	Ekuitas	2,48		1,84		1,66
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	1,04		3,64		-2,59
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,00		0,00		0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,00		0,00		0,00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa					
F63	Hak pensiunan					
F7	Transaksi derivatives	0,00		0,00		0,00
F8	Hutang/Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F89	Hutang/Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6,61	6,61	14,41	14,41	27,34

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

SEKTOR LNPRT, 2013-2017 (TRILIUN Rp)
OF NPISHs SECTOR, 2013-2017 (TRILLION Rp)

2015*	2016**		2017***		Transaction Categories	Code
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA		
16,23		17,09			Saving, gross	B8g
	8,15		8,97		Gross Capital Formation	P5g
	8,94		12,12		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	10,54		30,20		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
23,76		-1,60			Net change in financial position (A-L)	B9f
	9,75		1,69		Net acquisition of financial assets	A
3,58		11,34		19,77	Net acquisition of financial liabilities	L
					Monetary gold and SDRs	F1
					<i>Monetary gold</i>	F11
					<i>SDRs</i>	F12
	3,65		-5,98		Currency and deposits	F2
	0,00		0,00		<i>Currency</i>	F21
	-2,61		11,10		<i>Transferable deposits</i>	F22
	6,26		-17,08		<i>Other deposits</i>	F29
	0,10		0,04		Debt securities	F3
	0,00		0,00		<i>Short-term</i>	F31
	0,10		0,04		<i>Long-term</i>	F32
3,58	0,00	11,34	0,00	19,77	Loans	F4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Short-term</i>	F41
3,58	0,00	11,34	0,00	19,77	<i>Long-term</i>	F42
	6,00		7,63		Equity and investment fund shares	F5
	3,44		4,81		<i>Equity</i>	F51
	2,57		2,82		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	0,00		0,00		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	0,00		0,00		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
					<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
					<i>Pension entitlements</i>	F63
	0,00		0,00		Financial derivatives	F7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Other accounts receivable/payable	F8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
27,34	9,75	9,75	1,69	1,69	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary figures

** = Very Preliminary figures

TABEL 11. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2013		2014		2015*
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA
B8g	Tabungan Bruto		299,48		325,29	
P5g	Investasi NonFinansial	0,00		0,00		0,00
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	299,48		325,29		234,55
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-0,37		-26,16		-5,68
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		299,85		351,45	
A	Perolehan neto aset finansial	398,79		616,67		509,10
L	Perolehan neto kewajiban finansial		98,93		265,22	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	4,23		-9,59		1,05
F11	Emas Moneter	2,58		-5,21		0,61
F12	Hak Tarik Khusus	1,65		-4,38		0,44
F2	Uang dan Simpanan	15,77	14,24	27,75	58,80	10,61
F21	Uang	0,00	1,16	0,00	45,70	0,00
F22	<i>Transferable deposits</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Simpanan lainnya	15,77	13,09	27,75	13,10	10,61
F3	Surat Berharga	144,20	-42,72	237,69	96,29	249,77
F31	Jangka pendek	-26,66	0,00	16,58	0,00	-33,12
F32	Jangka panjang	170,86	-42,72	221,12	96,29	282,90
F4	Pinjaman	64,02	-9,96	128,74	2,46	26,67
F41	Jangka pendek	3,38	0,00	55,01	0,00	-132,65
F42	Jangka panjang	60,65	-9,96	73,73	2,46	159,32
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	189,11	125,25	266,45	122,69	230,34
F51	Ekuitas	210,09	125,25	282,27	122,69	230,16
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-20,98	0,00	-15,82	0,00	0,18
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F63	Hak pensiunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	-7,21	-3,71	-7,13	-5,27	-8,65
F8	Hutang/Piutang lainnya	-11,34	15,82	-27,25	-9,75	-0,69
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	5,65	9,29	2,39	10,59	5,62
F89	Hutang/Piutang lainnya	-17,00	6,53	-29,64	-20,34	-6,32
	TOTAL	398,79	398,79	616,67	616,67	509,10

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

SEKTOR LUAR NEGERI, 2013-2017 (TRILIUN Rp)
REST OF THE WORLD SECTOR, 2013-2017 (TRILLION Rp)

2015*	2016**		2017***		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
234,55		225,11			231,50	Saving, gross	B8g
	0,00		0,00			Gross Capital Formation	P5g
	225,11		231,50			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	-4,04		-4,23			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
240,22		229,16			235,73	Net change in financial position (A-L)	B9f
	220,36		637,16			Net acquisition of financial assets	A
268,88		-8,80			401,43	Net acquisition of financial liabilities	L
	-6,51		-5,89			Monetary gold and SDRs	F1
	-4,38		-3,98			<i>Monetary gold</i>	F11
	-2,13		-1,91			<i>SDRs</i>	F12
94,69	-6,37	-23,10	2,54	117,50		Currency and deposits	F2
46,65	0,00	-3,99	0,00	65,05		<i>Currency</i>	F21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Transferable deposits</i>	F22
48,04	-6,37	-19,10	2,54	52,46		<i>Other deposits</i>	F29
-5,29	206,13	103,51	354,92	158,28		Debt securities	F3
0,00	-9,89	0,00	26,98	0,00		<i>Short-term</i>	F31
-5,29	216,02	103,51	327,94	158,28		<i>Long-term</i>	F32
27,33	-80,11	-5,94	27,39	24,34		Loans	F4
0,00	88,70	0,00	59,60	0,00		<i>Short-term</i>	F41
27,33	-168,81	-5,94	-32,20	24,34		<i>Long-term</i>	F42
116,23	128,38	-137,88	240,84	56,31		Equity and investment fund shares	F5
116,23	104,50	-137,88	224,62	56,31		<i>Equity</i>	F51
0,00	23,88	0,00	16,22	0,00		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Pension entitlements</i>	F63
-8,85	-8,26	-8,13	-7,62	-5,90		Financial derivatives	F7
44,78	-12,90	62,74	24,96	50,89		Other accounts receivable/payable	F8
29,32	13,27	13,21	22,02	16,98		<i>Trade credits and advances</i>	F81
15,47	-26,17	49,53	2,93	33,91		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
509,10	220,36	220,36	637,16	637,16		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

* = Preliminary figures

** = Very Preliminary figures

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W.I. *National Income and Economic Accounting*, Prentice Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.

Badan Pusat Statistik, *Studi Neraca Arus Indonesia 1980*, Jakarta, 1987.

_____, *Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan*, berbagai seri, Jakarta.

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*, Jakarta, 2017

Board of Governors of the Federal Reserve System, *Guide to the Flow of Funds Accounts*, Washington, D.C, 2000.

Central Bank of the Philippines, *The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983*, Manila, 1985.

_____, *Flow of Funds Manual of Accounts*, Manila, 1983.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations, and World Bank, *System of National Accounts*, Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.

Copeland, M.A., *A study of Money of Flows in the United States*, New York, 1952.

Dawson, J.C., *Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia*, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.

Geehan, Randy, *An Analysis of the Indonesia Flow of Funds*, Occasional Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.

Geehan, Saldua, and Balances, *The Indonesian Flow of Funds*, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., *National Income and Flow of Funds Analysis*, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., *Principles of money Banking and Financial Markets*, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., *Ekonomi (Terjemahan)*, Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

United Nations , *Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts*, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, *Handbook of National Accounting, Public Sector*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

